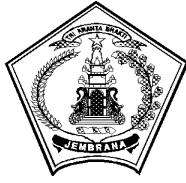


**PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA  
2011 – 2016**



**Jalan Mayor Sugianyar No. 1 Kompleks Civics Centre  
Telp. (0365) 41210 Fax (0365) 421010  
Negara Bali  
2011**

**PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA  
2011 – 2016**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA**  
Jalan Mayor Sugianyar No. 3 Komplek Civics Centre Telp. ( 0365 ) 41210  
N E G A R A

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA**  
**PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA**  
**NOMOR : / 15 / DIKPORAPARBUD/ 2011**

**TENTANG**  
**PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA**  
**PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA**  
**TAHUN 2011-2016**

**KEPALA DINAS DIKPORAPARBUD KABUPATEN JEMBRANA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2011-2016 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan pada Perda nomor 3 Tahun 2008;
  - b. bahwa untuk merencanakan program dan kegiatan tahun 2011-2016 dipandang perlu menetapkan Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana;
  - c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Perencanaan Strategis Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jemberana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jemberana

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Perencanaan Strategis Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jember Tahun 2011-2016.

- KEDUA : Perencanaan Strategis Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana 2011-2016 dimaksud dalam diktum PERTAMA disusun berdasarkan pada Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan .
- KETIGA : Naskah Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2011-2016 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Negara, 13 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga  
Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Jembrana,



**Nengah Alit, M.Pd**

Pembina Tk. I

NIP. 19641215 198803 1 007

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana sebagai laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai laporan,
3. Wakil Bupati Jembrana sebagai laporan,
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sebagai laporan,
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/instansi dan Bagian di Lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai laporan,
6. Para Camat se-Kabupaten Jembrana,
7. Arsip.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbinganNya, Penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana ini dapat kami selesaikan. Adapun tujuan Penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat isu strategis bagi Pembangunan Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jemberana.

Dalam Bab III Pasal 7 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan dilakukannya penyusunan Perencanaan Strategis ( RENSTRA ). Dengan ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jemberana 2011 – 2016, maka sesuai dengan ketentuan Bab V Pasal 15 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) ini, sehingga segala usul dan saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini.

Negara, 13 Juni 2011.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga  
Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Jemberana,



**Nengah Alit, M.Pd**

Pembina Tk. I

NIP. 19641215 198803 1 007



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat kegiatan strategis dalam pembangunan Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jembrana. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi yaitu **“TERWUJUDNYA KWALITAS LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN DAN KEPARIWISATAAN YANG BERBUDAYA, MENUJU MASYARAKAT JEMBRANA YANG CERDAS, TRAMPIL, MANDIRI BERMUTU DAN BERWAWASAN SERTA RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT JEMBRANA”**.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana, maka ditetapkan 10 (sepuluh ) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan berkualitas
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, produktif, mandiri, berdaya saing dan berwawasan global
3. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat Jembrana
4. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
5. Meningkatkan Kualitas/Mutu Layanan Pendidikan
6. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
7. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan
8. Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Nasional
9. Mewujudkan Sarana prasarana Pariwisata yang memadai serta melestarikan obyek dan daya tarik wisata
10. Menjamin kerjasama lintas sektoral untuk pengembangan kepariwisataan daerah.





Dalam upaya mewujudkan Misi yang diinginkan maka telah ditetapkan 8 (delapan) tujuan strategis dinas 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkeselarasan di Kabupaten Jemberana
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di Kabupaten Jemberana
3. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah bermutu, relevan dan berkesetaraan di Kabupaten Jemberana
4. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
5. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk Daerah
6. Melaksanakan pembinaan aktivitas generasi muda/pelajar.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka telah ditetapkan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya APK Kabupaten minimal 100%
2. Seluruh kepala sekolah SMA dan SMK mengikuti pelatihan Profesional berkelanjutan.
3. Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat.
4. 70% Lulusan SMK bekerja pada tahun kelulusan
5. Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan.
7. Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95% dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1% untuk jenjang pendidikan menengah.
8. Seluruh satuan pendidikan SMA menerapkan pembelajaran yang membangun karakter.
9. Terbinanya Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Jemberana minimal 80%
10. Dilestarikannya lembaga Adat Daerah dan pengembangan nilai budaya minimal 90%
11. Terselamatkannya kekayaan daerah yang dikelola 100%
12. Meningkatnya kualitas peran serta kepemudaan minimal 80%
13. Meningkatnya tingkat partisipasi pemuda yang dibina minimal 70%
14. Meningkatnya atlet pelajar yang berprestasi dan lolos ke tingkat propinsi dan nasional minimal 85%
15. Meningkatnya kesadaran Generasi muda/masyarakat akan pentingnya olahraga minimal



75%

16 Meningkatnya pengembangan dan pemasaran pariwisata minimal 25%

17 Meningkatnya Prosentase kunjungan wisatawan yang berkunjung ke jembrana minimal 10% dari tahun sebelumnya.

Disamping itu Kebijakan yang ditempuh mengacu pada ketentuan perundang – undangan serta peraturan lainnya seperti :

- 1 Undang – Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang – Undang No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Daerah.
3. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana No. 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2006 – 2025.
- 5 Peraturan Bupati Jemberana No. 19 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Jemberana Tahun 2011.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan tersebut dilakukan melalui berbagai Program, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Program Wajib Belajar 9 Tahun.
6. Program Pendidikan Menengah
7. Program Pendidikan Non Formal
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10. Program Pengembangan Nilai Budaya
11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
12. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
13. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
14. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan.



15. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
17. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
18. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
19. Program Pengembangan Kemitraan



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT KEPUTUSAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Landasan Hukum .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. JEMBRANA .....	13
2.1. Tugas Fungsi dan struktur Organisasi .....	36
2.2. Sumber Daya SKPD .....	39
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	45
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ...	47
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	48
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	49
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	51
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	72
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	74
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN	78
4.1 Visi dan Misi SKPD .....	84
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	88
4.3 Strategi dan Kebijakan .....	91
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	91
5.1 Rencana Prioritas Program .....	84
5.2 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan.....	88
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD	91
6.1 Indikator Kinerja .....	91
BAB VII PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. RENSTRA merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Disamping itu rencana strategis memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan.

Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD. Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam RENSTRA yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala Daerah sesuai dengan PP No. 108 tahun 2000, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan



berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jemberana Tahun 2011 – 2016, maka Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana tahun 2011 – 2016. Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana tahun 2011 – 2016 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jemberana tahun 2011 – 2016 pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, SKPD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan RENSTRA SKPD ini adalah :



1. Sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaannya lebih terarah.
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Agar terjaminnya sinergitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jemberana tahun 2011 – 2016.

Disamping itu RENSTRA SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Jemberana khususnya di bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

Dokumen RENSTRA ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu kepada visi dan misi Bupati Jemberana sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RENSTRA ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Fungsi Renstra Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jemberana dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Perencanaan Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan Pendidikan guna meningkatkan kinerja Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Dikporaparbud Kabupaten Jemberana merupakan perencanaan pembangunan pada urusan perencanaan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan



strategis, maka proses penyusunan Renstra Dikporaparbud Kabupaten Jembrana melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjarangan visi dan misi organisasi. Penjarangan visi dan misi Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkann visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana, visi dan misi Kabupaten Jembrana serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait.; **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang inbgin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala Dinas Dikporaparbud, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional 2010-2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Bali 2008-2013 (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2016.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Dikporaparbud diharapkan :





- Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait.
- Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan ‘*sense of ownership*’ dari rencana strategis
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan
- Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan pendidikan
- Dapat dihasilkan pengembangan pendidikan yang lebih produktif, efisien dan efektif.

## **1.2 Landasan Hukum.**

RENSTRA Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2016 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

1. Undang – Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan pemukiman.
2. Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta berbagai undang-undang, Keputusan Presiden serta peraturan dan keputusan Menteri tenaga Kerja dan transmigrasi yang terkait dengan Ketenagakerjaan.
3. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah.
5. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana;
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan RENSTRA yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 merupakan Rencana Pembangunan Pendidikan Kabupaten Jembrana dalam urusan Perencanaan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran periode kedua RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016, maka Renstra Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Perencanaan Pendidikan Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jembrana sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial



guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Jembrana yang berdaya guna dan berhasil guna.

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA ini antara lain adalah untuk:

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jembrana.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan
4. Tersusunnya program-program pembangunan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan daerah.
5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
7. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan Perencanaan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan selama lima tahun.
8. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan demikian RENSTRA ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan



Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2016 terdiri atas :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas : Pengertian Renstra, Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra, Keterkaitan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

Landasan Hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II PROFIL LAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA**

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah



personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

Kinerja SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini memuat:

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis ; Pada bagian ini direview kembali faktor-



faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

#### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, SERTA CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

#### **BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN**

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

#### **BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA**

Penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD



## **BAB VII PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA

#### 2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.

Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana merupakan SKPD gabungan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008, tanggal 24 Desember 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana. Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi 1 (satu) Sekretariat, dan 6 (enam) Bidang.

##### A. Tugas Pokok.

Tugas pokok Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan .

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya dibidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.





## **B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 46 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas Pokok Kabupaten Jembrana, ditetapkan Tugas Pokok Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, secara struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh beberapa bidang dengan tugas sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas mempunyai tugas :**

- a. Merumuskan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengevaluasi data/bahan untuk perencanaan urusan pendidikan pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- d. merencanakan, memanfaatkan, mengendalikan dan mensosialisasikan urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- e. Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- f. Mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi kegiatan urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, KUA dan PPAS; Mengkoordinasikan penyusunan capaian kinerja Dinas;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan serah terima kegiatan di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;



- j. Mengawasi pelaksanaan ketatausahaan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- l. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- m. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
- p. Melaporkan hasil, pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

## **2. Sekretaris mempunyai tugas :**

- a. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan Administrasi Umum dan kepegawaian , perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
- c. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dalam melaksanakan tugas;
- e. Melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, Inventarisasi dan perlengkapan Perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga Dinas;
- f. Menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan perlengkapan peralatan dinas;
- g. Merencanakan pelaksanaan pelayanan terhadap kebutuhan peralatan / perlengkapan dinas;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;



- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. Mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;
- l. Menyusun Laporan hasil kegiatan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **2.1 Sub Bagian Umum mempunyai tugas :**

- a. Membuat rencana operasional program kerja Sub Bagian Umum;
- b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan.
- c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga
- d. melaksanakan tugas humas dan keprotokolan dinas, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian dinas.
- e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian
- f. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas
- g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas
- h. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perlengkapan dinas.
- i. melaksanakan pemantauan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor , perlengkapan dan kendaraan dinas.
- j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala dan administrasi pensiun.
- k. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai
- l. mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
- m. menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan



## **2.2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana operasional kegiatan kerja sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- c. mengendalikan rencana tahunan;
- d. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan
- e. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian dan statistik serta informasi Dinas.
- g. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA dan DPA Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Penetapan Kinerja Dinas;
- k. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan
- l. membuat laporan hasil kegiatan sub Bagian;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **2.3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :**

- a. membuat rencana operasionalisasi program kerja sub bagian keuangan
- b. membuat daftar usulan kegiatan;
- c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum
- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas.
- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati;
- i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;



- k. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan memaraf surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan
- l. membuat laporan hasil kegiatan sub Bagian;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas :**

- a. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai kebijakan Dinas Dikporaparbud;
- b. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pendidikan Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Mengkoordinasikan konsep rencana Bidang Pendidikan Dasar dengan Kecamatan agar pelaksanaan tugas dapat terjalin harmonis;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas kepala seksi agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- f. Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang Pendidikan Dasar sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- g. Menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan dasar sebagai bahan penyusunan kebijakan ;
- h. Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan dasar termasuk pengawas;
- i. Memeberikan layanan teknis dibidang perencanaan dan memonitor pelaksanaan pada TK, SD dan mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi pendidikan;
- j. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.



### **3.1. Seksi Kurikulum mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi kurikulum pendidikan dasar sesuai dengan kebijakan dinas
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sederajat;
- e. menyiapkan bahan dalam penyusunan kurikulum, petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dasar
- f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kurikulum, petunjuk teknis dan pengelolaan pendidikan dasar.
- g. memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan PMB dan manajemen sekolah;
- h. melaksanakan persiapan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan ditingkat Kabupaten, pengkoordinasian dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar;
- i. melaksanakan motivasi pendidikan dasar dan pengembangan potensi murid pendidikan dasar, dan melakukan pembinaan wajib belajar pendidikan dasar.
- j. mengusul bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar, dan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dasar.
- k. melakukan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3.2. Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sarana prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional; sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar



- f. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan peantauan perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana.
- g. mengecek penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar;
- h. mengusulkan dan mengkoordinasikan pengadaan sarana dan prasarana bidang pendidikan dasar serta melakukan koordinasi dengan unit satuan organisasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pendidikan;
- i. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- j. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian hasil program kerja.
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah :**

- a. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pendidikan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Mengkoordinasikan konsep rencana pada kepala seksi dalam melaksanakan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan bidang Pendidikan Menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- f. Menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- g. Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan menengah kejuruan termasuk pengawas;
- h. Memberikan layanan teknis di bidang perencanaan dan memonitoring pelaksanaan pada SMU dan SMK, serta mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi Pendidikan Menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK);



- i. Mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah serta biaya penjaminan mutu satuan pendidikan menengah;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;

#### **4.1.Seksi Kurikulum mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi kurikulum pendidikan Menengah sesuai dengan kebijakan dinas
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten;
- e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi serta supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah dan kejuruan, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah dan kejuruan, implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK), implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK);
- f. mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan, dan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK).
- g. memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan dan menilai pelaksanaan PMB dan manajemen dan kejuruan;
- h. menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah dan kejuruan;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK).
- j. menyusun laporan, seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.





- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2. Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sarana prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. melakukan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK).
- e. melakukan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan
- f. mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan sarana dan prasarana bidang pendidikan menengah (SMP/MTs, SMA/MA dan SMK)
- g. menyusun laporan seksi sarana dan prasarana sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. melakukan pengawasan terhadap penentuan standar nasional sarana prasarana pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- k. memantau perkembangan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**5. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah :**

- a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan kebijakan Dinas;
- b. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menyusun rencana dan program kerja di bidang Pendidikan Luar Sekolah termasuk merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kepenilikan pendidikan luar sekolah ;



- e. Mengkoordinasikan konsep rencana pada kepala seksi dalam melaksanakan tugas;
- f. Memberikan petunjuk, bimbingan dan kepada kepala seksi agar hasil pelaksanaan tugas tercapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- g. Menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan bidang Pendidikan Luar Sekolah sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir ;
- h. Menelaah peraturan perundang-undangan Pendidikan Luar Sekolah;
- i. Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan Pendidikan Luar Sekolah;
- j. Memberi layanan teknis di bidang perencanaan pada pendidikan luar sekolah;
- k. Mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi pendidikan luar sekolah;
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi bidang pendidikan luar sekolah;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**5.1. Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi Pendidikan Masyarakat sesuai dengan kebijakan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- d. menyusun rencana program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C dan keaksaraan fungsional (KF) dan Life skill;
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan serta pengendalian lembaga-lembaga kursus atau lembaga yang disamakan;
- f. melaksanakan petunjuk teknis organisasi dan kegiatan Pendidikan Masyarakat mengkoordinasikan dengan instansi terkait organisasi masyarakat dalam rangka Pendidikan Masyarakat



- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga teknis pendidikan masyarakat;
- h. menyusun laporan seksi pendidikan masyarakat sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat dan kelembagaan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**5.2.Seksi Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berdasarkan program di bidang PLS
- b. melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan Non Formal (PTK-PNS) PAUD;
- c. menyelenggarakan program penguatan kelembagaan sanggar kegiatan belajar (SKB);
- d. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi tugas-tugas yang berkaitan dengan sanggar kegiatan belajar (SKB), serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada seksi sanggar kegiatan belajar (SKB) serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaankegiatan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



## **6. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga :**

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebijakan Dinas;
- b. Menyusun proyeksi perkembangan pembinaan pendidikan, pemuda olahraga sebagai bahan penyusunan kebijakan dibidang kepemudaan dan olahraga;
- c. menumbuh kembangkan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan dibidang Pemuda dan Olahraga;
- d. Memberikan layanan teknis dibidang keolahragaan pada tingkat SD,SDLB,SLB,SLTP,SMU dan SMK, serta pendidikan luar sekolah;
- e. Mendayagunakan program teknologi, komunikasi untuk pengelolaan data dan informasi bidang Pemuda dan Olahraga serta melakukan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. Melaksanakan, mengkoordinasikan dan/atau melakukan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
- g. Melakukan pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktivitas kepemudaan dan olahraga serta menginventarisir dan memberikan dukungan terhadap aktifitas kepemudaan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Bidang Pemuda dan Olahraga, serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- j. Memeberi petunjuk kepada Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.



**6.1. Seksi Kepemudaan mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi kepemudaan berdasarkan kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. menyusun juklak dan melaksanakan pemberdayaan pemuda;
- c. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Pertukaran pemuda Antar Propinsi ( PPAP) maupun antar Negara;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan PengurusOSIS SLTP/SLTA;
- e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi dan pembinaan terhadap Pemuda Pelopor/produktif;
- f. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ( PASKIBRAKA );
- g. menyiapkan bahan pembinaan terhadap sekolah yang mengikuti kegiatan lomba Wawasan Wiyata Mandala;
- h. melaksanakan pengawasan dan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier tenaga teknis kepemudaan;
- i. mengkoordinasikan dengan instansi terkait, organisasi masyarakat dalam rangka pembinaan kegiatan kepemudaan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Kepemudaan serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. membagi tugas pada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ;
- m. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- n. memberikan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;



o. melaporkan nhasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

**6.2. Seksi Olahraga mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Olahraga berdasarkan kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan seleksi dan melaksanakan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah ( POPWIL )
- c. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Pemuda Penggerak Organisasi Olahraga di Pedesaan;
- d. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah dan diluar sekolah;
- e. menyiapkan fasilitas pembinaan, sarana dan prasarana olahraga disekolah dan luar sekolah;
- f. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan olahraga;
- g. mengusulkan dan merekomendasikan pengadaan beasiswa dalam bidang olahraga bagi yang berprestasi dan pedoman-pedoman lainnya yang berkaitan dengan bidang olahraga;
- h. menyiapkan fasilitas dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan kesegaran jasmani, rekreasi dan olahraga tradisional, menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- i. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keolahragaan;
- j. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan lomba-lomba olahraga pelajar dan masyarakat;
- k. mengevaluasi pelaksaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi Olahraga, serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- m. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **7. Kepala Bidang Pariwisata :**

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pariwisata berdasarkan kebijakan Dinas;
- b. Menyusun kebijakan operasional bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah yang perlu diambil dalam tugas Pariwisata;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bidang Pariwisata, serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- f. Memberi petunjuk kepada Kepala seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **7.1. Seksi Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pariwisata berdasarkan kebijakan di bidang Pariwisata ;



- b. menyusun rencana Pengembangan bidang Pariwisata baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek ;
- c. menyusun program kerja bidang Pariwisata sesuai dengan calender of event baik yang berskala lokal, Propinsi maupun Nasional ;
- d menyusun rencana dalam rangka pelaksanaan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata ;
- e menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan pendataan dan penagihan pajak hotel, pajak restoran sesuai ketentuan yang berlaku;
- f melaksanakan kegiatan,penataan dan pengembangan obyek-obyek wisata/daya tarik wisata;
- g melaksanakan kegiatan penataan dan pengembangan atraksi wisata;
- h menyiapkan bahan pembinaan,monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akomodasi hotel, rumah makan beserta tenaga kerjanya;
- i mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di seksi Pengembangan Pariwisata, serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- l. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## **7.2. Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata;





- b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan promosi produk wisata baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional;
- c. melaksanakan hubungan kerjasama antar media dan atau lembaga informasi baik elektronik maupun media cetak dalam promosi pariwisata;
- d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan mitra kerja pariwisata;
- e. mengadakan kerjasama dengan komponen pariwisata khususnya dibidang pemasaran;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan pada Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata, serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinas yang diberikan oleh atasan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

#### **8. Kepala Bidang Kebudayaan**

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Kebudayaan berdasarkan kebijakan Dinas;
- b. Menggali, melestarikan membina dan mengembangkan seni budaya, bahasa, aksara dan sastra Bali;
- c. Melestarikan, membina, dan memberdayakan lembaga-lembaga adat dan nilai-nilai tradisional;
- d. Melaksanakan pemeliharaan dan perlindungan benda-benda budaya, benda-benda sejarah dan kepurbakalaan;
- e. Menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan museum, pengembangan nilai-nilai budaya termasuk



- budaya spiritual, antara lain penelitian, pengkajian sejarah dan nilai tradisional, penulisan, pemahaman dan perluasan informasi;
- f. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program pemeliharaan, pembinaan, pelestarian suaka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan;
  - g. Menyusun bahan bimbingan dan pembinaan pelestarian budaya daerah dan cagar benda budaya;
  - h. Menyusun bahan perencanaan dan program penggalian dan pelestarian kesenian tradisional dan rencana dan program penyelamatan, pengamatan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian benda cagar budaya;
  - i. Menyusun bahan bimbingan dan pembinaan kreatifitas karya-karya seni modern/kontemporer;
  - j. Menyusun bahan perencanaan dan program sarana dan pertunjukan kesenian;
  - k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di bidang kebudayaan, serta mencari alternatif pemecahannya;
  - l. Mengkoordinasikan Kepala Seksi agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
  - m. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - n. Menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir;
  - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  - p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

### **8.1. Seksi Pelestarian Seni Budaya mempunyai tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelestarian Seni Budaya berdasarkan kebijakan di Bidang Kebudayaan;
- b. mendata, menggali, mendokumentasikan dan mengadakan penulisan Benda-benda Cagar Budaya ( BCB ), tempat-tempat ibadah dan kesenian-kesenian sakral;



- c. menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pemberdayaan lembaga-lembaga adat seperti subak, subak abian, desa pekraman, sekehe teruna dan sekehe-sekehe pesantian ;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan musium, sejarah dan kepurbakalaan serta pelaksanaan kemah budaya;
- e. melestarikan dan mengembangkan Bahasa dan Sastra Indonesia atau Sastra Daerah dan Aksara Bali serta Utsawa Dharma Gita;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pelestarian Seni Budaya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

## **8.2. Kepala Seksi Seni Budaya mempunyai tugas**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Seni Budaya berdasarkan kebijakan di Bidang Kebudayaan;
- b. mendata, menggali seluruh cabang kesenian baik kesenian khas Jembrana, kesenian langka , kesenian sakral ( wali dan bebal ) dan kesenian provan ( balih-balihan );
- c. menyiapkan sarana dan prasarana parade dan lomba seni budaya tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional dan Internasional;
- d. menyiapkan bahan-bahan pembinaan untuk kegiatan Lomba Seni Musik dan Seni Modern;
- e. menyusun rencana kegiatan dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni tradisional dan tata busana tradisional Bali;



- f. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan pengembangan budi pekerti bagi para remaja;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Pengembangan Seni Budaya, serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

#### **2.1.7. Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang meliputi :

- a. identifikasi permasalahan;
- b. perumusan alternatif kebijakan perencanaan bidang Pendidikan;
- c. pengkajian alternatif;
- d. penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
- e. analisis pengendalian pelaksanaan Pendidikan;
- f. penilaian hasil pelaksanaan;
- g. membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang perencanaan bidang Pendidikan;
- h. melakukan kegiatan pengembangan dalam bidang Perencanaan Pendidikan
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Kepala Dinas.

#### **2.2. Sumber Daya SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten



Jemberana, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana, seperti terlampir.

Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana dapat dirinci sebagai berikut :

**1. Jumlah Pegawai sebanyak 106 orang terdiri dari :**

- a. Pegawai Negeri Sipil : 93 orang
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil : 6 orang
- c. Tenaga Honorer : 1 orang
- d. Tenaga Kontrak/Outsorsing : 6 orang

**2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan struktural :**

- a. Eselon II/b : 1 orang
- b. Eselon III/a : 1 orang
- c. Eselon III/b : 6 orang
- d. Eselon IV/a : 17 orang

**3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :**

- a. Golongan IV/c : - orang
- b. Golongan IV/b : 4 orang
- c. Golongan IV/a : 21 orang
- d. Golongan III/d : 7 orang
- e. Golongan III/c : 11 orang
- f. Golongan III/b : 21 orang
- g. Golongan III/a : 13 orang
- h. Golongan II/d : 2 orang
- i. Golongan II/c : 5 orang
- j. Golongan II/b : 13 orang
- k. Golongan II/a : 3 orang
- l. Golongan I/d : - orang

**4. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :**

- a. S.2 : 7 orang
- b. S.1 : 54 orang



Dikporaparbud Kab. Jembrana

c.	D3	:	5	orang
d.	D.2	:	-	orang
e.	D.1	:	-	orang
f.	SMA / sederajat	:	39	orang
g.	SMP / sederajat	:	-	orang



Dikporaparbud Kab. Jembrana



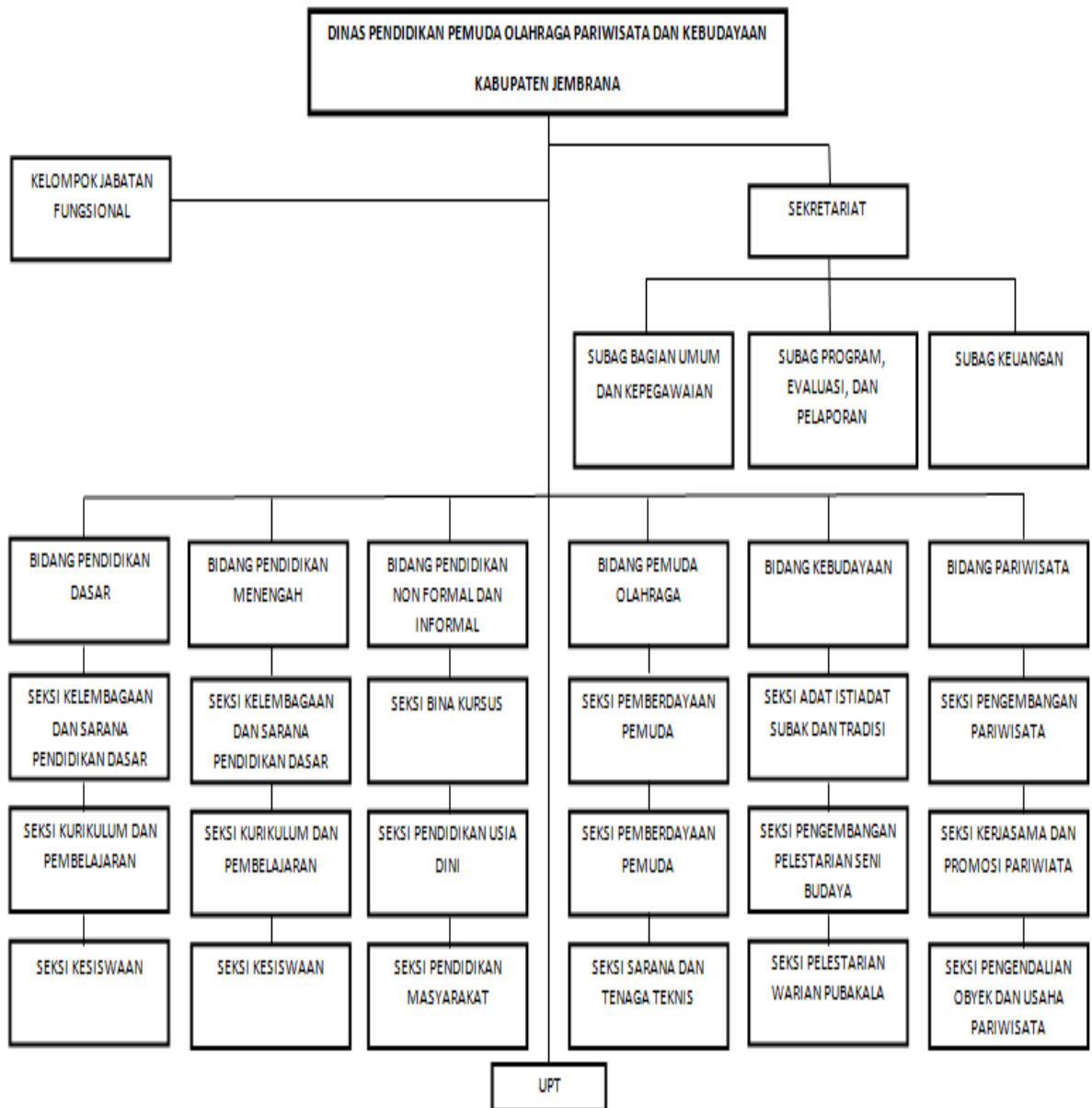
Dikporaparbud Kab. Jembrana





Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Dikporaparbud, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana bagan dibawah :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS DIKPORAPARBUD BERDASARKAN PERDA NO. 15 TAHUN 2011  
Tabel 2.1





## 2.3 Kinerja Pelayanan

### a. Urusan Pendidikan

#### a.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD. Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari 23,94 pada tahun 2008 menjadi 24,09 pada tahun 2010.

Tabel 2.2  
Capaian Pendidikan Anak Usia Dini 2008 - 2010

No	Indikator kinerja	2008	2009	2010
1	APK (%)	23,94	23,19	24,09

#### a.2 Pendidikan Dasar

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah Kabupaten Jembrana telah melakukan berbagai upaya terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. APK jenjang SD/MI terus mengalami peningkatan dari 112,25% pada tahun 2005 menjadi 115,55% pada tahun 2010. Pada periode yang sama angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 98,50% pada tahun 2010. Selanjutnya pada jenjang SMP/MTs sederajat, APK juga mengalami peningkatan dari 97,57% pada tahun 2005 menjadi 110,50% pada tahun 2010. Seperti terlihat pada tabel 2.3.



Tabel 2.3  
Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2005 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	APK SD/MI	112,25	112,37	107,29	110,27	110,63	115,55
2	Angka Partisipasi Murni SD/MI	100,11	100,11	92,63	96,01	96,45	98,50
3	Rasio Guru SD/MI terhadap siswa	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18
4	Guru SD/MI S1/D4	447	494	580	846	897	945
5	APK SMP/MTs	97,57	97,51	95,30	105,38	106,46	110,50
6	APM SMP/MTs	89,27	88,50	88,33	80,13	85,89	90,00
7	Rasio Guru SMP/MTs terhadap Siswa	1:11	1:12	1:12	1:12	1:14	1:12
8	Guru SMP/MTs S1/D4	489	561	562	634	642	683
9	Proporsi Lulusan SD/MI	97,50	99,97	100	99,32	98,60	100
10	Proporsi Lulusan SMP/MTs	99,06	99,85	99,89	99,82	99,23	100

Bila dilihat capaian APK SD/MI dan SMP/MTs dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Bali Kabupaten Jemberana masih relatif lebih tinggi, bahkan melebihi dari target Nasional. Sementara itu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah mencukupi, serta distribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Pada jenjang SD secara nasional rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Jemberana telah sangat baik yaitu : 18 siswa per guru, sedangkan pada jenjang SMP/MTs adalah secara nasional sudah mendekati baik yaitu mencapai 12 siswa per guru. Sementara itu proporsi guru SD/MI dan SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan sertifikasi juga menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun.

### a.3 Pendidikan Menengah

APK SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 70,08 pada tahun 2005 menjadi 95,00 pada tahun 2010 (lihat Tabel 1.4). Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja di bidang pendidikan menengah cukup baik bahkan melewati standar nasional.



Tabel 2.4  
Capaian Pendidikan Menengah Tahun 2005 - 2010

No	Indikator Kinerja	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	APK (%)	70,08	68,77	73,99	82,90	81,35	95,00
2	APM (%)	64,91	66,25	72,23	64,37	69,78	75,60
3	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal SMA	-	-	-	1	1	1
4	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal SMK	-	-	-	2	2	2
5	Rasio Guru SMA/MA terhadap siswa	1:20	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
6	Rasio Guru SMK/MAK terhadap siswa	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
7	Guru SMA/MA Berkualifikasi S1/D4	441	439	395	248	452	452
8	Proporsi Lulusan SMA/SMK	97,26	97,43	99,30	99,79	98,07	99,97

Melihat tabel tersebut diatas, maka tingkat capaian kinerja bidang pendidikan menengah setiap tahun (2005 – 2010) terus menunjukkan peningkatan yang cukup baik.

#### a.4 Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal dan Informal juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, angka buta aksara penduduk usi 15 tahun keatas menurun dari 13,11 % pada tahun 2005 menjadi 7,76 % pada tahun 2010. Seperti dapat dilihat dalam tabel 1.5

Tabel 2.5  
Capaian Pendidikan pada jalur pendidikan Nonformal Tahun 2005 – 2010

No	Indikator Kinerja	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Angka Buta Aksara Penduduk Usia > 15 Tahun (%)	13,30	13,11	12,00	11,04	10,40	7,76

#### b. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian Kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur dengan indikator; Jumlah Organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) dan Lapangan Olahraga



Tabel 2.6  
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2006 – 2009

NO	Indikator	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Klub Olahraga	3	3	3	3	3
2	Jumlah Gedung olahraga	1	2	2	6	6
3	Jumlah Organisasi Pemuda	25	25	25	25	25
4	Jumlah Organisasi Olahraga	13	13	13	13	13
5	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	9	8	8	8	8
6	Jumlah Kegiatan Olahraga	1	1	1	1	1

Dalam capaian kinerja dibidang Pemuda dan Olahraga tahun 2006 – 2010 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung program bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor, direncanakan dengan aktivitas, terbinannya pemuda melalui kegiatan kepemudaan dengan Indikator Kinerja Utama adalah jumlah pemuda putus sekolah yang dibina untuk meningkatkan peran serta kepemudaan, Meningkatkan kualitas penghayatan Napak Tilas Jejak Pahlawan, dengan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai perjuangan khususnya napak tilas jejak perjuangan pahlawan nasional, dan Pembinaan Olahraga dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional dengan melibatkan atlit-atlit kabupaten jembrana
2. Kegiatan pengadaan sarana prasarana olah raga, dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana cabang olahraga di Kabupaten Jembrana dengan sasaran meningkatnya prestasi atlit pelajar di Kabupaten Jembrana.

### c. Urusan Pariwisata

Capaian Kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator : Kunjungan wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.



Tabel 2.7  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2006 – 2009

NO	Indikator	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kunjungan Wisata	28.853	33.435	39.578	62.805	65.300
2	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB		24,4%	24,4%	14,56%	14,56%

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pariwisata tahun 2005 – 2010 telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Promosi Wisata, direncanakan penyediaan Booklet berkaitan dengan penyampaian informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Jembrana, dengan sasaran Kegiatan dalam program ini adalah meningkatnya jaringan kerjasama promosi pariwisata.
2. Kegiatan Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, direncanakan berupa pelaksanaan lomba mekepong dengan target sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya.
3. Mewujudkan Pendataan Obyek wisata Kabupaten Jembrana dengan harapan kunjungan wisata ke Kabupaten Jembrana dapat meningkat. Dalam mendukung sasaran kegiatan penataan obyek wisata maka Program yang dilaksanakan adalah Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dan capaian kinerja adalah :

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata sasaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata sebanyak di Kabupaten Jembrana.

#### **d. Urusan Kebudayaan**

Capaian Kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator : Penyelenggaraan festival seni budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya , dan jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Tabel 2.8  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2006 – 2009



NO	Indikator	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Penyelenggaraan festival seni budaya	-	9	5	10	10
2.	Jml sarana penyelenggaraan seni dan budaya	-	15	3	5	5
3.	Jumlah Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	100%	60%	100%	100%

Untuk mendukung capaian kinerja di bidang Kebudayaan telah dilaksanakan beberapa Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

**a. Program Pengembangan Nilai Budaya, dilaksanakan melalui kegiatan :**

Kegiatan Pelestarian dan aktualitas adat budaya daerah, dengan target terlaksananya kegiatan Utsawa Dharma Gita, sasaran kegiatan adalah meningkatnya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dengan indikator kinerja utama adalah jumlah peserta yang mengikuti pemahaman etika dan moral anak-anak, remaja dan dewasa melalui utsawa dharma gita.

**b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya meliputi kegiatan :**

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat di Kabupaten Jembrana dengan Fasilitasi penyelenggaraan lomba desa pekraman, subak-subak dan sekaha teruna, sasaran kegiatan adalah meningkatnya pemberdayaan lomba-lomba adat daerah dengan indikator kinerja utama adalah jumlah organisasi adat yang mengikuti lomba-lomba adat untuk meningkatkan kualitas dan berdayanya lembaga adat.

**c. Program pengelolaan keragaman Budaya**

1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, dalam rangka pelaksanaan peringatan HUT Kota Negara di Kabupaten Jembrana Sasaran kegiatan adalah meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dengan indikator kinerja adalah jumlah keikutsertaan sekaa kesenian dalam pelaksanaan festival budaya daerah.
2. Kegiatan Pesta Kesenian Bali (PKB) direncanakan untuk meningkatkan prestasi dalam keikutsertaan pada Pesta Kesenian Bali, sasaran kegiatan adalah meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dengan indikator kinerja adalah jumlah keikutsertaan sekaa kesenian dalam pelaksanaan festival budaya daerah.



## **2.4. Peluang, Tantangan, Kekuatan dan Kelemahan**

### **Peluang (Opportunity)**

- a. Adanya komitmen dari Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pelayanan dibidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan mengakibatkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.
- c. Adanya kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka pembangunan bidang pendidikan, pemuda olahraga pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Jembrana
- d. Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- e. Adanya ketersediaan dana yang cukup oleh pemerintah daerah untuk mendukung program-program dan kegiatan bidang pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan.

### **Tantangan (Threat)**

- a. Adanya kepentingan politik dalam penentuan kebijakan Pendidikan.
- b. Terbatasnya Tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata
- c. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan belum dikelola dengan maksimal

### **Kekuatan (Strengthness) :**

- a. Tenaga trampil dibidang pendidikan, pemuda olahraga pariwisata dan kebudayaan telah tersedia;
- b. Sarana dan prasarana pelayanan dibidang pendidikan pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan yang tersedia sudah memadai.
- c. Adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.





- d. Adanya Peraturan Kepegawaian yang memberi peluang kepada pegawai untuk mengembangkan potensinya.

**Kelemahan (Weakness) :**

- a. belum optimalnya pemanfaatan tenaga trampil sehingga pelayanan dibidang pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata dan kebudayaan masih dirasakan belum memadai.
- b. Sarana / prasarana yang ada belum ditunjang dengan jumlah tenaga yang memadai.
- c. Masih terbatasnya anggaran kegiatan yang dialokasikan dalam APBD.
- d. Profesionalime SDM Aparatur belum optimal.



### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.**

Pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016, berdasarkan RPJMD tersebut Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember telah menyusun Renstra (Rencana Strategis) Dinas, dimana dalam perencanaan lima tahun kedepan tentunya akan diidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi baik terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, berdasarkan perkembangan pembangunan pendidikan kurun waktu 5 (lima) tahun, maka permasalahan yang sering terjadi terutama di bidang pendidikan dari pendidikan Anak Usia Dini sampai Pendidikan Menengah adalah Belum Optimalnya pelaksanaan PAUD nonformal dan informal terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 0 – 6 tahun serta kurangnya pendidikan orang tua dalam hal mengasuh anak (parenting education), dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat dalam pengembangan program taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD Sejenis. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah masih belum memadai. Peningkatan kualitas pendidikan menengah masih terkendala oleh penyediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai, Dimana baru 85% sekolah yang baru memiliki perpustakaan, dan sementara hanya 60% sekolah yang memiliki computer. Dari sisi tenaga kependidikan, kualifikasi guru belum seluruhnya S1/D4 serta masih ada tenaga pendidik yang belum memiliki sertifikasi pendidik. Kalau dilihat dari permasalahan tersebut maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD adalah :

1. Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas
2. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya dapat diwujudkan
3. Ketersediaan keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan jenjang menengah masih belum memadai



4. Pengembangan pemberdayaan masyarakat terhadap pendidikan masih belum merata dan belum sesuai dengan yang diharapkan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah mengacu kepada tema pembangunan daerah, dimana telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Jember adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jember melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”, dari Visi tersebut ditetapkan 5 Misi yaitu :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatkan Perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi dasar daerah dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, **pendidikan** dan sosial dasar lainnya.
4. Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dari Misi Kabupaten yang telah ditetapkan maka prioritas pembangunan pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan 3 (tiga) urusan Wajib dan 1 (satu) urusan pilihan. Urusan wajib dan prioritas sesuai Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2011 – 2016 urusan pendidikan adalah Misi ketiga, maka sesuai amanah tersebut maka pelaksanaan baik program dan kegiatan di bidang pendidikan harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan dalam



melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih antara lain :

- a. Faktor-faktor penghambat :
  1. Terbatasnya sarana dan prasarana.
  2. Kemampuan SDM, baik kuantitas dan kualitas belum memadai
  3. Terbatasnya anggaran yang tersedia.
- b. Faktor-faktor pendorong :
  1. Adanya tupoksi dan struktur organisasi.
  2. Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.
  3. Tersedianya Standar Operating Presedure (SOP), Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  4. Kemajuan informasi dan teknologi.
  5. Tersedianya sarana dan prasarana.
  6. Dukungan dana.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Renstra Propinsi**

Renstra Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana disusun sejalan dengan Visi Kemendiknas dengan Tema “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk membentuk Insan Cerdas Komprehensif ” dan untuk mencapai visi maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas /Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
4. Mewujudkan Kesetaraan dalam memperoleh layanan Pendidikan
5. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan.

Sedangkan rencana prioritas Pembangunan Nasional Terselenggaranya Layanan Prima Pembangunan Nasional adalah : **“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat**



**Daerah**". Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional dan tiga prioritas lainnya sebagai berikut :

- 1) Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,
- 2) Prioritas 2 : Pendidikan,
- 3) Prioritas 3 : Kesehatan,
- 4) Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan,
- 5) Prioritas 5 : Ketahanan Pangan
- 6) Prioritas 6 : Infrastruktur,
- 7) Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
- 8) Prioritas 8 : Energi,
- 9) Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- 10) Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik
- 11) Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Prioritas lainnya meliputi :

- 1) Prioritas di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
- 2) Bidang Perekonomian,
- 3) Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Di samping mengacu pada rencana dan prioritas pembangunan Nasional juga mengacu pada prioritas pembangunan Daerah Propinsi Bali tahun 2011 yaitu :

- 1) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
- 2) Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
- 3) Pemantapan Ketahanan Pangan
- 4) Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM dan Koperasi
- 5) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Kebudayaan
- 6) Pemantapan Sistem Pengamanan Terpadu Berstandar Internasional dan Pengelolaan Bencana
- 7) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur



- 8) Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

#### **Urusan Pendidikan**

##### **A. Pemerataan dan Perluasan/Akses Pendidikan**

Kemajuan pendidikan di kabupaten/kota Jembrana sangat menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan semakin meratanya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan secara merata hingga menjangkau seluruh pelosok pedesaan sehingga tidak ada lagi warga masyarakat Kabupaten Jembrana yang tidak mendapatkan layanan pendidikan.

Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, berturut-turut akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD yang terdiri dari SD dan MI dan SDLB, tingkat SMP yang terdiri dari SMP dan MTs, serta tingkat Sekolah Menengah (SM) yang terdiri dari SMA, SMK, dan MA.

##### **1. Tingkat SD /SDLB/MI**

Dalam upaya perluasan untuk memperoleh kesempatan pendidikan berbagai program rehabilitasi fisik telah dilaksanakan baik yang bersumber dari dana APBN, APBD I dan APBD II untuk merehabilitasi ruang kelas, ruang guru dan perpustakaan yang mengalami rusak berat maupun sedang. Dengan adanya rehabilitasi ini diharapkan akan tercipta suasana proses belajar mengajar yang aman nyaman dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/Mi di Kabupaten Jembrana.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Mi di Kabupaten Jembrana sejak tahun 2008 hingga tahun 2010 disajikan dalam tabel berikut :



**Tabel. 3.1**  
**Pencapaian APK/APM**  
**SD/SDLB/Mi Tahun 2008 – 2010**

<b>Tahun</b>	<b>APK</b>	<b>APM</b>
2008	110,27	96,01
2009	110,63	96,45
2010	115,55	98,50

Meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, namun APK SD/SDLB/Mi di Kabupaten Jembrana selama tiga tahun terakhir telah melampaui tingkat paripurna yakni berada di atas angka 95% yang ditetapkan secara nasional.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2011, jumlah SD/SDLB dan MI sebanyak 195 buah, dengan rincian SD 184 buah, MI: 10 buah, SDLB: 1 buah. Jumlah siswa SD/SDLB/Mi seluruhnya adalah 30.671 dengan rincian siswa SD seluruhnya sebanyak 28.156 orang, siswa SDLB sebanyak: 55 orang dan siswa Mi sebanyak 2.460 orang. Sedangkan jumlah guru SD/SDLB/Mi pada tahun 2010 berjumlah 1.606 orang dengan rincian; PNS: 1.465 orang, Non PNS : 141 orang yang tersebar pada SD/SDLB/Mi yang ada di Kabupaten Jembrana, dengan rincian guru SD seluruhnya berjumlah 1.452 orang, guru Mi keseluruhan berjumlah 147 orang: dan SDLB berjumlah 7 orang.

Bila dilihat dari segi rasio murid : guru pada tahun 2010 mencapai rasio 19 : 1 hal ini berarti memenuhi rasio standar minimal yang ditetapkan dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang guru. Dengan demikian rasio guru : murid untuk SD, MI telah memenuhi standar ideal yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mendukung kelancaran proses belajar mengajar diperlukan ruang kelas yang memadai sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Jumlah ruang kelas yang tersedia di tahun 2010 keseluruhan berjumlah 1.219 ruang kelas dengan rincian, ruang kelas SD sebanyak 1.129 ruang, ruang kelas SDLB: 12 ruang kelas, dan sisanya ruang kelas MI sebanyak 78 ruang kelas.

Dari segi rasio murid : ruang kelas diperoleh rasio 25 : 1. Rasio ini masih di bawah rasio maksimal secara nasional yaitu 28 : 1. Bercermin dari rasio murid : ruang kelas di atas, maka tidak perlu lagi dilaksanakan penambahan ruang kelas di



SD/Mi. Rasio yang kecil ini tentunya harus mampu dimanfaatkan oleh guru secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, mengingat semakin kecil jumlah murid dalam satu kelas akan semakin memudahkan bagi guru dalam mengelola pembelajaran yang efektif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Dari keseluruhan jumlah guru SD, MI, dan SDLB yang ada di Kabupaten Jembrana, sejak tahun 2006 hingga 2010, sebanyak 571 orang telah lulus sertifikasi, dan sisanya menunggu kuota sertifikasi tahun berikutnya. Dengan adanya sertifikasi guru ini diharapkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas profesinya dapat semakin meningkat sehingga *output* dan *outcome* pendidikan dapat semakin meningkat pula.

Angka rasio murid dan guru SD, MI, dan SDLB di Kabupaten Jembrana adalah 19 : 1. angka ini menunjukkan rata-rata guru SD/SDLB/Mi mengajar 19 orang perkelas. Rasio ini masih di bawah standar minimal yang dipersyaratkan dalam PP No. 74 Tahun 2008 yakni minimal 20 : 1. Hal ini tidak terlepas dari suksesnya program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga masing-masing kepala keluarga berupaya menekan jumlah keturunan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

Mengingat Proses Belajar Mengajar di SD, MI menggunakan guru kelas dan guru mata pelajaran untuk mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan dan mata pelajaran agama, maka jumlah guru yang diperlukan di SD dan MI adalah  $\sum$  rombel + 1 guru mapel pendidikan jasmani olahraga kesehatan dan 1 guru mata pelajaran agama.

Terkait dengan amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen serta PP No. 74 Tahun 2008 yang mewajibkan guru agar mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, maka guru mapel agama dan penjaskesorkes yang mengajar di sekolah dengan jumlah rombel 6, dapat dioptimalkan dengan mengampu mata pelajaran sejenis di dua sekolah dalam rangka pemenuhan jam mengajar minimal 24 jam tatap muka.

Apabila penghitungan jumlah guru di SD, MI menggunakan rumus: Jumlah Guru Ideal =  $\sum$  rombel + 1 guru, maka jumlah guru SD,/SDLB/MI di Kabupaten Jembrana mengalami sedikit kelebihan. khusus untuk jumlah guru SD yang





berstatus PNS periode Juni tahun 2011 ini berjumlah 1.465 orang dengan jumlah rombel sebanyak 1.266 rombel. Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk merasionalisasi jumlah guru yang ada di SD/SDLB/ MI memenuhi katagori ideal.

Dari segi infrastruktur pendidikan untuk menampung seluruh peserta didik pada tahun 2011 ini tersedia ruang kelas SD Negeri sebanyak: 1.111 ruang, SD swasta sebanyak: 28 ruang, dan Mi sebanyak 78 ruang, dan SDLB sebanyak 12 ruang kelas. Dari segi kondisi fisik ruangan yang ada, keseluruhan ruang belajar di SD dalam keadaan baik, mengingat sudah direhabilitasi melalui kegiatan DAK tahun 2009,2010 sedangkan untuk Mi sebanyak 51 dalam kondisi baik, 4 ruang dalam kondisi rusak ringan dan 0 dalam keadaan rusak berat.

Buku pelajaran sangat menentukan dalam keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu pembangunan sarana fisik berupa gedung yang telah dilaksanakan selama ini harus diimbangi dengan kelengkapan sarana pendukung pembelajaran berupa buku pelajaran. Rasio murid : buku yang ada di SD, Mi di tahun 2008 mencapai rasio 0,6 di tahun 2009 mencapai rasio 0,7 sedangkan di tahun 2010 mencapai rasio 0,8. Rasio murid : buku ini diharapkan terus dapat ditingkatkan sehingga pada tahun 2012 diharapkan sudah mencapai rasio 1 : 1 buku.

Dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang efektif setiap siswa idealnya memiliki 1 buku pelajaran untuk setiap mata pelajaran. Dengan demikian perlu dipikirkan upaya-upaya untuk pengadaan buku pelajaran sehingga setiap siswa memiliki buku pelajaran. Dan dalam rangka untuk efisiensi penggunaan buku pelajaran untuk menghindari kesan tiap ganti tahun pelajaran ganti buku pelajaran, maka buku ini dipergunakan minimal selama 5 tahun. Dengan demikian pendidikan efektif dan efisien yang diprogram oleh pemerintah dapat segera terwujud.

## **2. Tingkat SMP (SMP dan MTs)**

Perkembangan pembangunan pendidikan pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Jembrana telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini terbukti dari berbagai program unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Jembrana, baik yang menyangkut pembangunan fisik gedung sekolah dan bantuan beasiswa bidang pendidikan kepada siswa yang tergolong tidak mampu atau



mengalami rawan putus sekolah, dan siswa yang berprestasi. Dari berbagai program inovatif yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana telah membuahkan hasil yang menggemirakan. Hal ini tercermin dari capaian angka APK dan APM bidang pendidikan yang telah mencapai katagori paripurna di atas 95%. Seperti yang terlihat dalam tabel data berikut.

Tabel 3.2  
Pencapaian APK/APM  
SMP/MTs Tahun 2008 – 2010

<b>Tahun</b>	<b>APK</b>	<b>APM</b>
2008	105,38	80,13
2009	106,46	85,89
2010	110,50	90.00

Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2011 jumlah siswa untuk SMP sebanyak 11.401 orang dan siswa MTs berjumlah 1.444 orang dengan jumlah guru SMP sebanyak 683 orang, dan guru MTs berjumlah 164 orang, dengan rincian 593 orang guru SMP berstatus sebagai PNS, dan 89 orang guru berstatus sebagai Non PNS, untuk MTs 80 orang guru berstatus sebagai PNS dan 84 orang guru berstatus sebagai Non PNS. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas SMP sebanyak 395 ruang dan, ruang kelas MTs sebanyak 38 ruang yang kesemuanya dalam kondisi baik.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2010 jumlah siswa untuk SMP sebanyak 10.471 orang dan siswa MTs berjumlah 1.381 orang dengan jumlah guru SMP sebanyak 644 orang, dan guru MTs berjumlah 171 orang dengan rincian 584 orang guru SMP berstatus sebagai PNS, dan 58 orang guru berstatus sebagai Non PNS, untuk MTs 86 orang guru berstatus sebagai PNS dan 87 orang guru berstatus sebagai Non PNS. Jumlah siswa SMP/MTs di tahun 2010 ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2009. Sedangkan jumlah guru SMP/Mts justru mengalami penurunan yang diakibatkan karena ada beberapa guru yang memasuki usia pensiun. Untuk menampung sejumlah siswa



tersebut, tersedia ruang kelas SMP sebanyak 292 ruang dan, ruang kelas MTs sebanyak 48 ruang yang kesemuanya dalam kondisi baik.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah siswa SMP mengalami peningkatan menjadi 11.401 orang, begitupula dengan siswa MTs mengalami peningkatan menjadi 1.444 orang. Untuk guru SMP mengalami peningkatan menjadi 683 orang karena dari 2008 ada pengangkatan untuk guru SMP. Begitu juga dengan jumlah guru yang ada di MTs mengalami peningkatan menjadi 164 orang, dengan rincian 670 orang guru SMP/MTs berstatus sebagai PNS, dan 145 orang guru berstatus sebagai Non PNS.

Untuk menampung seluruh jumlah siswa, tersedia ruang kelas SMP/MTs sebanyak 340 ruang. Apabila kita kaitkan dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana, yang menyatakan bahwa kapasitas maksimum ruang kelas SMP/MTs adalah 32 peserta didik. Dengan demikian berarti untuk jenjang SMP masih diperlukan 16 RKB dalam upaya menuju standar yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007.

Bila dilihat dari segi rasio antara siswa dengan guru pada tahun 2011 adalah 659/10.000 Penduduk, rasio ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 687/10.000 Penduduk. Sedangkan rasio siswa terhadap ruang belajar/kelas tahun 2011 adalah 33. Jumlah ini pun sesungguhnya masih melebihi kapasitas maksimum yang ditetapkan dalam Permendiknas No.24 Tahun 27 tentang Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan maksimal 32 siswa per kelas. Berdasarkan kondisi di atas, dalam upaya memperluas dan pemeratakan akses untuk mendapatkan pendidikan serta menuju kondisi isi ruang kelas yang ideal, maka perlu direncanakan untuk penambahan ruang kelas baru (RKB) SMP sebanyak 16 ruang kelas.

### **3. Tingkat SMA/SMK/MA**

Mengingat capaian APK dan APM untuk Wajar Dikdas 9 Tahun telah mencapai target yang ditetapkan maka Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jember terus melakukan inovasi dalam bidang pembangunan pendidikan dengan mencanangkan Wajar 12 Tahun yang telah dituangkan dalam Perda No. 15 Tahun 2006.



Dengan dicanangkannya program Wajar 12 Tahun ini diharapkan dapat meningkatkan APK dan APM SMA/SMK serta berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jembrana. Berdasarkan hasil pendataan di bidang pendidikan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA mengalami peningkatan seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.3  
Pencapaian APK/APM  
SMA/SMK/MA Tahun 2008 – 2010

Tahun	APK	APM
2008	82,90	64,37
2009	81,35	69,78
2010	95.00	75.60

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2011 jumlah siswa SMA, SMK dan MA adalah 10.193 orang dengan rincian siswa SMA: 5.738 orang, SMK: 3.893, dan MA: 862 orang. Jumlah guru SMA, SMK dan MA di tahun 2011 sebanyak 829 orang. Apabila dilihat dari segi rasio murid dengan guru pada tahun 2011 mencapai 14:1 Kondisi ini menunjukkan bahwa rasio murid dengan guru di Kabupaten Jembrana berada di atas rasio minimal yang dipersyaratkan dalam PP No. 74 tahun 2008 yaitu rasio minimal untuk SMA 20 :1, SMK, minimal 15:1 dan SMK, 15:1.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 296 ruang kelas. Apabila kita mengacu kepada PP No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan maka jumlah peserta didik untuk SMA/SMK idealnya 32 orang. Dengan demikian apabila isi ruang kelas standarisasinya mengacu PP No. 19 maka diperlukan penambahan ruang kelas baru (RKB) sebanyak 22 ruang.

Mengingat kebijakan Depdiknas dalam rangka mengubah rasio SMA: SMK = 33%:67% di tahun 2010, maka dalam rangka penambahan RKB di tahun-tahun mendatang agar lebih difokuskan pada penambahan RKB SMK sehingga rasio jumlah SMK : SMA yang diprogram oleh Depdiknas dapat direalisasikan.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2011 jumlah siswa SMA, SMK dan MA adalah 10.193 orang dengan rincian siswa SMA: 5.738 orang, SMK: 3.893, dan



MA: 862 orang. Jumlah guru SMA, SMK dan MA di tahun 2011 sebanyak 829 orang dengan rincian 417 orang guru SMA, 301 orang guru SMK, dan 111 orang guru MA. Bila dibandingkan dengan tahun 2010 Jumlah siswa maupun guru mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan jumlahnya. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 296 ruang kelas.

Bila dilihat rasio antara siswa dengan guru SMA, MA dan SMK adalah 34 : 1 dan masih di atas standar nasional yang ditetapkan secara nasional yaitu 32 : 1. Apabila daya tampung kelas distandardisasikan mengacu pola ideal yang ditetapkan secara nasional maka diperlukan 318 ruang kelas. Bertolak dari jumlah ruang kelas yang ada maka diperlukan penambahan ruang kelas baru sebanyak 22 ruang kelas.

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2010 jumlah siswa SMA, SMK dan MA adalah 10.493 orang dengan rincian siswa SMA: 5.738 orang, SMK: 3.893 orang, dan MA: 862 orang. Jumlah guru SMA, SMK dan MA di tahun 2010 sebanyak 802 orang. Dilihat dari segi jumlah siswa secara keseluruhan mengalami penurunan sebanyak 300 orang, dan jumlah guru secara keseluruhan mengalami penurunan sejumlah 27 orang karena pensiun.

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, SMK dan MA terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 21 buah, lapangan olahraga sebanyak 16 buah, ruang UKS sebanyak 24 buah, laboratorium sebanyak 39 buah, ruang keterampilan sebanyak 9 buah, ruang BK sebanyak 24 buah, ruang serba guna sebanyak 5 buah, Bengkel sebanyak 5 buah, dan ruang praktik sebanyak 13 buah.

Mengingat jumlah sekolah SMA/MA jauh lebih banyak (61%) dibandingkan dengan SMK, maka sesuai dengan prioritas pembangunan pendidikan SMK hendaknya mendapat perhatian untuk dapat dibangun dan dikembangkan sebagai jawaban dalam memenuhi lulusan yang siap kerja di dunia kerja dengan meningkatkan skill atau keterampilan yang relevan dan berkompentensi memadai, dengan mengacu kepada relevansi lulusan yang siap ditampung dalam kesempatan kerja atau minimal dapat membuka peluang untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri.

Dari seluruh jumlah ruang kelas SMA, SMK, dan MA yang berada dalam kondisi baik adalah 262 buah, kondisi rusak ringan 25 ruang, sedangkan ruang kelas yang memiliki kondisi rusak berat berjumlah 9 buah. Ruang kelas yang mengalami



kondisi yang rusak berat ini, sudah mendapat prioritas untuk mendapat bantuan rehabilitasi sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi kelayakan mengajar, guru yang layak mengajar, ternyata paling banyak di SMA yaitu sebesar 417 orang, ( 50,30% ) dan yang terkecil di MA yaitu sebesar 111 orang, ( 13,38%), sedangkan untuk jenjang SMK mencapai 301 orang (36,31 %).

Berdasarkan APK yang ada pada tahun 2010, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 115,55 persen, selanjutnya APK pada tingkat SMP/MTs adalah 110,50 persen dan yang terendah di tingkat SMA/SMK/MA yaitu 95,00 persen. Tingginya APK adalah akibat adanya penambahan jumlah penduduk usia sekolah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SMP mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat SD dan tingkat SMA. Di daerah ini anak yang bersekolah di tingkat SD paling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya.

APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD yaitu 98,50 persen dan yang terendah di tingkat SMA/SMK/MA 75.6 persen. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat Anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan kinerja yang paling baik terdapat di tingkat SD.

Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat tertinggi di tingkat SMP/MTS dengan angka 40 dan terjarang terdapat di tingkat SD sebesar 19. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini sangat heterogen. Keheterogenan sekolah juga terlihat dari adanya tipe sekolah yaitu tipe A, B, C, dan kecil. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas tertinggi terdapat di tingkat SMP/MTS yaitu 40.

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar terdapat pada tingkat SD yaitu 19 dan terendah terdapat pada SMA yaitu 13. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut.

Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut.



Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SMP yaitu sebesar 273 Hal itu berarti, bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Sebaliknya, terdapat ruang kelas yang tidak digunakan, ini terlihat pada rasio di bawah 1 yang terdapat di tingkat SD..

Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SMP dan SD yang cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SMP juga cukup tinggi. Diharapkan bila jumlah tingkat SMP ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Sebaliknya, angka melanjutkan ke tingkat SMA lebih kecil dengan melanjutkan ke tingkat SMP. Salah satu sebab rendahnya angka melanjutkan ini karena perbandingan sekolah tingkat SMA dan SMP juga rendah.

Berdasarkan indikator yang ada dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SMA Mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SD. dan tingkat SMP. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut.

## B. Mutu Dan Relevansi

Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima indikator mutu yaitu: (1) mutu masukan, (2) mutu proses, (3) mutu SDM, (4) mutu fasilitas, dan (5) biaya. Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa baru tingkat I untuk tingkat SD adalah berasal dari tamatan TK atau sejenis.

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang hanya terdapat pada tingkat SD. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SMA yaitu sebesar 0.04 persen dan terendah terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar 0.02 persen. Bila dilihat angka lulusan ternyata angka kelulusan pada tingkat SD dan SMP sudah mencapai 100 persen dan terendah terdapat pada tingkat SMA yaitu sebesar 99.97 persen.

Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SD Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka



mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar terbesar adalah pada tingkat SD yaitu 100 persen dan guru yang layak mengajar terendah adalah pada tingkat SMP. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah, hal itu terlihat pada kesesuaian ijazah guru dengan bidang studi yang diajarkan.

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada tingkat SD sedangkan kondisi rusak yang paling banyak terdapat pada tingkat SMP.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada tingkat SMA yaitu sebesar 93.73 persen dan terendah ada pada tingkat SD sebesar 81.02 persen. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada tingkat SM. Yaitu sebesar 56.25. persen dan terendah ada pada tingkat SD. Sebesar 0 persen. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada tingkat SMP yaitu sebesar 90.00 persen. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut maka terdapat 10.00 persen yang belum memiliki fasilitas tersebut.

Berdasarkan indikator mutu dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SMP Mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SD dan tingkat SMA. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah SMK memiliki perpustakaan terbesar jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada SMA, ruang UKS terbesar pada SMA, ruang laboratorium terbesar pada SMA ruang keterampilan terbesar di SMK, ruang BP terbesar pada SMK, dan ruang Serba Guna terbesar pada SMK. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketujuh fasilitas tersebut, maka SMK. Memiliki angka terbesar. Dengan melihat indikator mutu sarana prasarana dapat dikatakan bahwa SMK mempunyai mutu prasarana terbaik.





Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada orang tua dengan persentase terbesar pada SMA. jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya. Partisipasi pemerintah pusat terbanyak terdapat di MA, demikian juga partisipasi orang tua siswa. Ternyata partisipasi pemerintah daerah paling tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi lainnya.

Berdasarkan indikator mutu yang ada dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SMA, SMK, dan MA, maka dapat dikatakan bahwa SMK mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan SMA. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut. Dengan demikian, kinerja mutu yang lebih buruk ini yang harus ditangani lebih lanjut.

Tidak seperti dua indikator sebelumnya yang menggunakan jenis indikator yang sama, indikator untuk relevansi antara tingkat SD, SMA, dan SMK berbeda. Untuk SD merupakan relevansi antara muatan lokal dengan mata pelajaran yang dikembangkan oleh daerah, untuk SMA merupakan relevansi antara siswa menurut jurusan di SMA dengan kriteria dan prosedur penjurusan di SMA, sedangkan untuk SMK adalah relevansi antara lulusan dengan yang terserap di sektor mata pencaharian. Oleh karena itu, analisisnya juga dibedakan antara ketiga jenis sekolah tersebut.

#### 1. Sekolah Dasar (SD)

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa kabupaten Jembrana mempunyai relevansi pendidikan yang baik antara kurikulum muatan lokal yang ada dengan mata pelajaran yang dikembangkan di SD. Hanya kabuapten/kota atau kecamatan. Yang tidak ada relevansinya antara kurikulum muatan lokal dengan mata pelajaran yang dikembangkan di tingkat SD. Selanjutnya, bila dilihat dari sektor dominan yang ada pada setiap kabupaten/kota atau kecamatan tersebut, maka kurikulum muatan lokal dan mata pelajaran yang dikembangkan di tingkat SD pada beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yaitu -. relevan



dengan lingkungan yang ada, sedangkan beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yaitu - sama sekali tidak relevan dengan lingkungan yang ada.

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka kabupaten/kota atau kecamatan yang tidak ada relevansinya hendaknya dijadikan prioritas utama untuk ditangani lebih lanjut sehingga relevan, misalnya dengan mengganti mata pelajaran yang dikembangkan sesuai dengan sektor dominan atau lingkungan sekolah.

## 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa semua kecamatan. mempunyai relevansi pendidikan yang baik antara kriteria dan prosedur penjurusan dengan jumlah siswa yang ada di SMP. Kriteria dan prosedur penjurusan dilaksanakan dalam tiga kriteria yaitu berdasarkan TPA, Prestasi Akademik/non ademik, tes bakat/minat,. Semua Kecamatan di Kabupaten Jembrana sudah relevan karena menggunakan kreteria gabungan dan minat

## 3. Sekolah Menengah Umum (SMA)

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa semua kecamatan -. mempunyai relevansi pendidikan yang baik antara kriteria dan prosedur penjurusan dengan jumlah siswa yang ada di SMA. Kriteria dan prosedur penjurusan dilaksanakan dalam empat kriteria yaitu berdasarkan prestasi, tes bakat/minat, gabungan, dan belum melaksanakan. Semua Kecamatan di Kabupaten Jembrana sudah relevan karena menggunakan kreteria gabungan dan minat

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka kabupaten/kota atau kecamatan yang tidak ada relevansinya hendaknya dijadikan prioritas utama untuk ditangani lebih lanjut sehingga relevan, misalnya dengan mengharuskan setiap SMA menggunakan kriteria gabungan atau minimal menggunakan prestasi atau minat dalam melaksanakan penjurusan di tingkat III SMA.

## 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Lulusan SMK kelompok teknologi dan industri seharusnya dapat terserap di lapangan kerja di tiga sektor yaitu pertambangan, penggalian dan



industri pengolahan, serta bangunan; kelompok pertanian dan kehutanan terserap di sektor pertanian dan kehutanan; kelompok bisnis dan manajemen terserap di dua sektor yaitu perdagangan dan keuangan; kelompok pariwisata terserap di sektor angkuta dan jasa kemasyarakatan; kelompok kesejahteraan masyarakat terserap di dua sektor yaitu listrik, gas, dan air dengan jasa kemasyarakatan; sedangkan kelompok seni dan kerajinan terserap di dua sektor yaitu perdagangan dan angkutan.

Dari jumlah SMK yang ada, sudah 100 persen yang telah melaksanakan pendidikan sistem ganda (PSG), hal itu membuktikan bahwa sudah ada relevansi antara SMK dengan dunia industri atau dunia usaha.

Selain itu, berdasarkan data dapat diketahui bahwa secara keseluruhan belum terdapat relevansi antara lulusan SMK dengan lapangan kerja yang ada. Hal itu dibuktikan dengan masih sedikitnya lulusan yang dapat diserap oleh sektor mata pencaharian di masyarakat. Lulusan yang banyak dihasilkan adalah lulusan dari kelompok pertanian, sedangkan yang paling sedikit adalah dari kelompok Bisnis/manajemen. Di samping itu, jenis lapangan kerja yang banyak menyerap lulusan adalah dari sector Pertanian dan yang paling sedikit adalah dari sektor Bisnis / Manajemen.

Dengan menggabungkan dari 9 sektor menjadi 6 sektor sesuai dengan kelompok di SMK maka lulusan kelompok Bisnis dan Managemen. merupakan lulusan terbesar yang dapat diserap di lapangan kerja, sedangkan kelompok Pertanian Merupakan lulusan terkecil yang dapat diserap di lapangan kerja.

Dengan melihat kondisi seperti ini, maka untuk daerah ini SMK yang paling cocok adalah SMK kelompok Otomotif sedangkan SMK yang paling tidak sesuai adalah SMK kelompok Pertanian Oleh karena itu, agar lulusan SMK dapat dimanfaatkan oleh daerah setempat, sebaiknya diperbanyak SMK kelompok Otomotif, sedangkan SMK kelompok ini sebaiknya diganti dengan kelompok lain yang lebih sesuai.



### Urusan Pemuda Olahraga

Kurangnya nasionalisme di antara pemufaktor yang sangat menentukan didalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu adanya pembinaan pemuda pelopor untuk meningkatkan rasa nasionalisme di antara pemuda, untuk mendukung hal tersebut pembinaan pemeningkatan peran serta kepemudaan sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas pemuda pelopor dengan penghayatan Napak Tilas Jejak Pahlawan, dan untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai perjuangan khususnya napak tilas jejak perjuangan pahlawan nasional.

Tabel 3.4  
Capaian Program Bidang Kepemudaan (2005 – 2010)

No.	Kegiatan Pemuda	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Napak Tilas	220	220	220	220	220	220
2	Pelatihan Paskibraka	30	30	30	30	30	30
3	Pelatihan OSIS Kab. Jembrana di Provinsi	23	23	23	23	23	23
4	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Kab. Jembrana di Provinsi	15	15	15	1	15	15
5	Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP) Kab. Jembrana di Provinsi dan Tk. Nasional.	3	3	3	3	3	3
6	Penyuluhan Narkoba Kab. Jembrana di Propinsi	15	15	15	15	15	15
7	Seleksi Pemuda Pelopor di Kabupaten, Tk. Provinsi dan Nasional	5	5	5	5	5	5

Sedangkan untuk olahraga berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi atlit pelajar baik dari penyediaan sarana prasarana dan pembentukan atlit-atlit di berbagai cabang olahraga. Sarana prasarana sangat mendukung sekali di dalam pencapaian prestasi olahraga disamping itu juga pelatih dan atlit perlu ditingkatkan kompetensinya masing-masing. sehingga baik dari sarana prasarana olahraga dan pelatih maupun atlit saling melekat. Data dibawah ini menunjukkan perkembangan Pemuda dan Olahraga Tahun 2005 s/d 2010. Dibawah ini disampaikan data perkembangan capaian program olahraga :



Tabel. 3.5  
Data Perkembangan Pemuda dan Olahraga Tahun 2005 – 2010  
Capaian Program Bidang Olahraga

No.	Prestasi Olahraga	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Atletik						
	- Emas	9	6	1	6	4	6
	- Perak	7	7	4	3	2	2
	- Perunggu	9	7	6	3	3	2
2	Pencak Silat	4	6	2	2	4	1
	- Emas	3	11	3	3	2	1
	- Perak	11	5	6	6	4	7
	- Perunggu						
3	Sepak Takraw	5	2	0	2	3	0
	- Emas	1	2	1	0	1	5
	- Perak	3	3	2	3	2	3
	- Perunggu						
4	Bulutangkis						
	- Emas	0	0	0	0	0	0
	- Perak	0	0	0	0	0	0
	- Perunggu	4	1	3	1	1	1
5	Tenis Lapangan						
	- Emas	0	0	0	0	0	0
	- Perak	0	0	0	0	0	0
	- Perunggu	1	2	2	1	2	3
6	Renang						
	- Emas	0	0	0	0	0	1
	- Perak	0	0	0	1	3	6
	- Perunggu	6	1	0	5	6	7
7	Tenis Meja						
	- Emas	2	1	0	0	0	0
	- Perak	0	0	2	1	0	0
	- Perunggu	3	5	0	2	0	2
8	Bola Voli						
	- Emas	2	3	0	2	2	1
	- Perak	1	1	0	0	0	0
	- Perunggu	0	0	0	1	0	0
9	Bola Basket						
	- Emas	0	1	0	0	0	0
	- Perak	0	0	0	0	0	0
	- Perunggu	0	0	0	1	2	0
10	Sepak Bola						
	- Emas	2	0	0	1	0	0
	- Perak	0	1	0	1	1	0
	- Perunggu	0	0	1	0	1	0
11	Senam Lantai						
	- Emas	0	0	0	0	0	0
	- Perak	0	0	0	1	1	1
	- Perunggu	2	0	1	3	0	1
12	Catur						
	- Emas	0	0	0	0	1	1



	- Perak	0	0	0	0	0	0
	- Perunggu	0	0	2	2	0	0
13	Panjat Tebing						
	- Emas	0	0	0	8	7	14
	- Perak	0	0	0	10	11	7
	- Perunggu	0	0	0	10	8	3
14	Voli Pasir						
	- Emas	0	0	0	0	0	0
	- Perak	0	0	0	0	0	0
	- Perunggu	0	0	0	0	0	0
15	Judo						
	- Emas	0	0	0	0	0	0
	- Perak	0	0	0	0	0	0
	- Perunggu	0	0	0	0	0	0
16	Karate						
	- Emas	0	0	0	0	0	0
	- Perak	0	0	0	0	0	0
	- Perunggu	0	0	0	0	0	0

### Urusan Pariwisata.

Pembangunan pariwisata dilaksanakan melalui pengembangan pariwisata dengan promosi dan peningkatan sarana prasarana pariwisata sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap sektor pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisata untuk berkunjung ke Kabupaten Jemberana. Kalau dilihat peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Jemberana pada tahun 2006 adalah sebanyak 28.853 wisatawan dan 62.805 wisatawan pada tahun 2010 maka dari tahun ke tahun kunjungan wisata ke Kabupaten Jemberana terus meningkat. Mengingat Jemberana bukan merupakan daerah tujuan wisata maka perlu pemikiran kita bersama dalam mendukung peningkatan kunjungan wisata ke Kabupaten Jemberana pada khususnya dan bali pada umumnya. Untuk menyelenggarakan urusan pariwisata ini diperlukan koordinasi yang baik dan terus menerus dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2006 – 2009

NO	Indikator	2006	2007	2008	2009
1	Kunjungan Wisata	28.853	33.435	39.578	62.805
2	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB		24,4%	24,4%	14,56%



### Urusan Kebudayaan.

Pengembangan Kebudayaan di Kabupaten Jembrana dilaksanakan dengan pelestarian kesenian tradisional, lembaga adat, dan budaya yang ada di kabupaten jembrana sehingga kebudayaan yang telah dijaga dan terpelihara dengan baik terus dapat dilestarikan. Dilihat dari pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Jembrana lembaga-lembaga adat yang telah dilestarikan sebanyak 25 lembaga adat, 5 kelompok sekaa dan 20 sekaa kesenian tradisional di tahun 2010. Untuk tahun kedepan diharapkan lembaga-lembaga adat dan budaya serta kesenian tradisional dapat terpelihara dengan lebih baik, dan dilestarikan. Untuk menyelenggarakan urusan Kebudayaan ini diperlukan koordinasi yang baik dan terus menerus dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2006 – 2009

NO	Indikator	2006	2007	2008	2009
1.	Penyelenggaraan festival seni budaya	-	9	5	10
2.	Jml sarana penyelenggaraan seni dan budaya	-	15	3	5
3.	Jumlah Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	100%	60%	100%

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan urusannya terdapat isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Tersedianya peraturan dan perundang-perundangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif *namun* belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Jembrana.
- b. Pelayanan yang diberikan diupayakan mengacu pada standard operation procedure (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam menerapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang kadang-kadang *kurang* difahami secara benar.
- c. Jumlah personil aparatur yang ada saat ini tingkat efektivitas dalam berkoordinasi dan berkomunikasi antar personil cukup efektif, namun secara profesionalisme dirasakan *belum* optimal.



- d. SDM perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- e. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur ruang gerak SKPD khususnya bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dalam menerapkan program kerja melalui kegiatan-kegiatannya masih *terbatas*.
- g. Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas
- h. Kurangnya tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata.
- i. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah.
- j. Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional, dan transparan.
- k. Meningkatkan Profesionalisme organisasi kepemudaan/generasi muda
- l. Belum maksimalnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Nasional
- m. Meningkatkan dan melestarikan daya tarik obyek wisata untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kab. Jembrana





## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, SERTA CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 VISI DAN MISI

##### Visi

Setiap lembaga perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana, mengacu pada tugas Pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 43 tahun 2008, yang menggambarkan : Apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas.

Perumusan Visi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Visi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jemberana disusun sebagai berikut :

Visi Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Jemberana Tahun 2011 - 2016

“Terwujudnya Kualitas Layanan Prima Pendidikan dan Kepariwisataan yang  
Berbudaya, Menuju Masyarakat Jemberana yang Cerdas, Trampil, Mandiri,  
Bermutu dan Berwawasan serta relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Jemberana”

Yang dimaksud dengan layanan prima adalah layanan pendidikan yang :



1. Tersedianya Layanan Pendidikan dasar dan menengah secara merata di seluruh pelosok Kabupaten Jembrana;
2. Terjangkaunya Layanan Pendidikan dasar dan menengah oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri
4. Setara bagi warga masyarakat Jembrana dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keragaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
5. Menjamin kepastian bagi masyarakat Jembrana untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industry.

### **Misi**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana, maka ditetapkan 8 (delapan ) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
2. Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevan Layanan Pendidikan
4. Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
5. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan
6. Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Nasional.
7. Mewujudkan Sarana prasarana Pariwisata yang memadai serta melestarikan obyek dan daya tarik wisata
8. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk pengembangan kepariwisataan.

## **4.2 .Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2011 - 2016**

### **4.2.1 Tujuan Strategis**

Untuk merealisasikan visi misi Dinas, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2011 – 2016 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2011 – 2016



dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dengan memperhatikan rumusan misi dinas 2011 – 2016. Dengan demikian, tujuan strategis dinas 2011 – 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkeselarasan di Kabupaten Jemberana
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di Kabupaten Jemberana
3. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah bermutu, relevan dan berkesetaraan di Kabupaten Jemberana
4. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk Daerah
5. Melaksanakan pembinaan aktivitas generasi muda/pelajar.
6. Terbinanya pelajar/generasi muda/ masyarakat untuk meningkatkan prestasi Olahraga
7. Melaksanakan pengembangan pariwisata dan kebudayaan Daerah

#### **4.2.2 Sasaran Strategis Tahun 2011 - 2016**

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2016. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan (Meneg PAN, 2008;21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagai penjabaran dari tujuan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :



Tabel : 4.1  
Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis.

NO	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
1	Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Sarana dan Prasarana Ruang Belajar</li> <li>- Meningkatnya APK dan APM</li> <li>- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan.</li> </ul>
2	Pemerataan Kesempatan Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkeselarasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APK PAUD diharapkan mencapai <math>\geq 50\%</math></li> <li>- Kualifikasi untuk pendidik PAUD formal diharapkan 85% berpendidikan S-1/D4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk pendidik PAUD Nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%</li> <li>- Seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan menyenangkan anak.</li> </ul>
3	Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di Kabupaten Jembrana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APM SD/MI/Paket A Kabupaten mencapai <math>\geq 94\%</math> <math>\geq 50\%</math></li> <li>- APS kelompok usia 7-12 th mencapai 99,9%</li> <li>- APK SMP/MTs/Paket B mencapai <math>\geq 110\%</math></li> <li>- APM SMP/MTs/Paket B sederajat mencapai <math>\geq 85\%</math></li> <li>- APS kelompok usia 13-15 th mencapai 99%</li> <li>- Seluruh kepala sekolah SD dan SMP mengikuti pelatihan Profesional berkelanjutan</li> <li>- Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1% angka melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/paket B sekurang-kurangnya 99%.</li> <li>- Angka melanjutkan lulusan SMP/MTs/sederajat 99,9%</li> <li>- Sekurang - kurangnya 88% guru SD berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat</li> <li>- Sekurang - kurangnya 98% guru SMP berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat</li> <li>- Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95% dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1% untuk jenjang pendidikan dasar.</li> </ul>



NO	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
3	Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah bermutu, relevan dan berkesetaraan di Kabupaten Jemberana	<ul style="list-style-type: none"><li>- APK Kabupaten minimal 100%</li><li>- Seluruh kepala sekolah SMA dan SMK mengikuti pelatihan Profesional berkelanjutan.</li><li>- Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat.</li><li>- 70% Lulusan SMK bekerja pada tahun kelulusan</li><li>- Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan.</li><li>- Meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan minimal 95% dan menurunnya angka putus sekolah maksimal 1% untuk jenjang pendidikan menengah.</li><li>- Seluruh satuan pendidikan SMA menerapkan pembelajaran yang membangun karakter.</li></ul>
4	Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terbinanya Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Jemberana minimal 80%</li><li>- Dilestarikannya lembaga Adat Daerah dan pengembangan nilai budaya minimal 90%</li><li>- Terselamatkannya kekayaan daerah yang dikelola 100%</li></ul>
5	Meningkatkan pembinaan aktivitas generasi muda/pelajar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya kualitas peran serta kepemudaan minimal 80%</li><li>- Meningkatnya tingkat partisipasi pemuda yang dibina minimal 70%</li></ul>
6	Terbinanya pelajar/generasi muda /masyarakat untuk meningkatkan prestasi olahraga	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya atlet pelajar yang berprestasi dan lolos ke tingkat propinsi dan nasional minimal 85%</li><li>- Meningkatnya kesadaran Generasi muda/masyarakat akan pentingnya olahraga minimal 75%</li></ul>
7	Melaksanakan pengembangan pariwisata dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya pengembangan dan pemasaran pariwisata minimal 25%</li><li>- Meningkatnya Prosentase kunjungan wisatawan yang berkunjung ke jemberana minimal 10% dari tahun sebelumnya.</li></ul>



### 4.3. Strategi dan Kebijakan

#### 4.3.1 Strategi

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.

1. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis dari terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan, dicapai dengan menggunakan strategi :
  - b. Penyediaan pendidik PAUD berkompeten yang merata di seluruh Kabupaten Jember yang meliputi pemenuhan guru TK/TKLB berkompeten dan penyediaan tutor PAUD Non Formal berkompeten;
  - c. Penyediaan manajemen PAUD berkompeten yang merata di kabupaten jember yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas dan tenaga administrasi
  - d. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, standar mutu, dan keterlaksanaan akreditasi, serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk PAUD
  - e. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran TK/TKLB berkualitas yang merata
  - f. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan TK/TKLB berkualitas yang merata di Kabupaten Jember
2. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis dari Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di Kabupaten Jember, dicapai dengan menggunakan strategi :



- a. Penyediaan pendidik Pendidikan Dasar berkompeten yang merata yang meliputi pemenuhan guru SD/SDLB, SMP/SMPLB serta tutor paket A dan B berkompeten
  - b. Penyediaan manajemen SD/SDLB, dan SMP/SMPLB serta paket A dan Paket B berkompeten yang merata yang meliputi pemenuhan kepala satuan , pengawas dan tenaga administrasi.
  - c. Penyediaan dan Pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan dasar, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan dasar.
  - d. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB dan SMP/SMPLB berkualitas yang merata di Kabupaten Jemberana.
  - e. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB berkualitas yang merata di Kabupaten Jemberana.
  - f. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket A dan B berkualitas yang merata di seluruh Kabupaten Jemberana.
3. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis dari Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah bermutu, relevan dan berkesetaraan di Kabupaten Jemberana, dicapai dengan menggunakan strategi :
- a. Penyediaan pendidik Pendidikan Menengah berkompeten yang merata yang meliputi pemenuhan guru SMA/SMK serta tutor paket C
  - b. Penyediaan manajemen SMA/SMK serta paket C berkompeten yang merata yang meliputi pemenuhan kepala satuan , pengawas dan tenaga administrasi.
  - c. Penyediaan dan Pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan Menengah, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan Menengah.
  - d. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA berkualitas yang merata di Kabupaten Jemberana.



- e. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK berkualitas yang berbasis keunggulan local dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di Kabupaten Jemberana.
  - f. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMK berkualitas yang merata di seluruh Kabupaten Jemberana.
  - g. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket C berkualitas yang merata di seluruh Kabupaten.
4. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis dari Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk daerah dicapai dengan menggunakan strategi :
- a. Pelestarian adat dan budaya daerah dengan mengembangkan nilai-nilai budaya.
  - b. Pembinaan lembaga-lembaga adat daerah yang merata di seluruh Kabupaten Jemberana.
  - c. Pengelolaan Adat dan budaya daerah serta revitalisasi adat budaya daerah serta kesenian daerah Kabupaten Jemberana
5. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis dari Meningkatkan pembinaan aktivitas generasi muda/pelajar dengan menggunakan strategi :
- a. Penyediaan pelatihan-pelatihan kepemudaan/pemuda pelopor secara berkesinambungan di seluruh Kabupaten Jemberana
  - b. Penyediaan Pembinaan pemuda pelopor tentang nilai-nilai luhur jejak Pahlawan Nasional, dan pendalaman nilai nasionalisme pemuda di Kabupaten Jemberana
6. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis dari Terbinanya Pelajar/Generasi Muda/Masyarakat untuk meningkatkan prestasi olahraga dengan menggunakan strategi :





- a. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga Pelajar/Generasi Muda/Masyarakat yang merata di seluruh Kabupaten
- b. Penyediaan Pelatih dan atlit yang berbakat di semua Cabang olahraga di Kabupaten Jembrana.

7. Strategi Pencapaian Tujuan Strategis dari Melaksanakan pengembangan pariwisata dengan menggunakan strategi :

- a. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata di kawasan-kawasan potensi pariwisata.
- b. Penyediaan promosi wisata daerah ke seluruh daerah bahkan ke mancanegara, dengan media booklet, brosur maupun melalui TIK

Dari seluruh strategi pembangunan Pendidikan dapat dirumuskan ke dalam strategi umum yang tertulis pada Tabel 1.15 berikut :

Tabel 1.15.  
Rumusan Strategi

NO	Komponen	Strategi Umum
1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penyediaan tenaga pendidik berkompeten yang merata di seluruh Kabupaten Jembrana
		Penyediaan manajemen satuan pendidikan berkompeten yang merata di Kab. Jembrana
2	Pembelajaran dan Penilaian	Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
		Penyediaan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal
3	Sarana dan Prasarana	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di Kabupaten Jembrana
4	Pendanaan	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas yang merata di Kab. Jembrana
		Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran non formal dan informal berkualitas
5	Tata Kelola	Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis pendidikan
		Penguatan Akuntabilitas sistem keuangan di lingkungan Dinas
		Penguatan Akuntabilitas pengelolaan Asset milik daerah di lingkungan Dinas
		Penguatan Akuntabilitas sistem pengawasan internal dinas



#### 4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Tahun 2011 – 2016

Strategi umum dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan lima tahun yang akan datang. Keterkaitan strategi umum dan arah kebijakan tertulis dalam tabel 1.16. berikut :

Tabel 1.15.  
Strategi umum dan arah kebijakan

No	Strategi Umum	Arah Kebijakan
1	Penyediaan tenaga pendidik berkompeten yang merata di seluruh Kabupaten Jemberana	a. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik b. Peningkatan mutu lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan dan lulusannya
2	Penyediaan manajemen satuan pendidikan berkompeten yang merata di Kabupaten Jemberana	a. Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
3	Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	a. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa b. Pengembangan Pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha
4	Penyediaan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal	a. Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pendidik
5	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di Kabupaten Jemberana	a. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional b. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang Pendidikan c. Penyediaan Buku Teks murah
6	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas yang merata di Kab. Jemberana	a. Rasionalisasi Pendanaan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat b. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
7	Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran non formal dan informal berkualitas	a. Penguatan dan Perluasan Pendidikan Non Formal dan informal
8	Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis pendidikan	a. Reformasi Birokrasi b. Koordinasi antar Pemerintah Daerah Propinsi dan Pusat (Kementrian Pendidikan)
9	Penguatan Akuntabilitas sistem Keuangan di Lingkungan Dinas	
10	Penguatan Akuntabilitas pengelolaan Asset milik daerah di lingkungan Dinas	
11	Penguatan Akuntabilitas sistem pengawasan internal dinas	



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **5.1 Rencana Prioritas Program**

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SKPD maupun Pemerintah Daerah.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Berdasarkan uraian visi dan misi, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana mengagendakan Program Pembangunan Pelayanan berupa rencana program/kegiatan indikatif untuk periode 2011– 2016 antara lain :

#### **5.1. PROGRAM SKPD.**

##### **Pendidikan :**

##### **1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).**

a. Publikasi dan Sosialisasi PAUD.

##### **2. Program Wajib Belajar 9 Tahun.**

a. Penambahan Ruang Kelas Sekolah.

b. Pengadaan Perlengkapan Sekolah



- c. Rehabilitasi Sedang/Berat Kelas Sekolah
- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktekum Sekolah
- f. Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- g. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta
- h. Penyelenggaraan Paket A setara SD
- i. Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran
- j. Lomba-lomba Pendidikan
- k. Penyelenggaraan Operasional TK.
- l. Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- m. Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas Pendidikan SD
- n. Kegiatan Lomba-lomba Olimpiade mata pelajaran.
- o. Peningkatan sarana Prasarana dan kualitas pendidikan sekolah menengah Pertama

### **3. Program Pendidikan Menengah**

- a. Pembangunan Gedung Sekolah.
- b. Penambahan ruang kelas sekolah
- c. Pengadaan Meubelair.
- d. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- e. Pemeliharaan rutin/berkala taman lapangan upacara dan fasilitas parker
- f. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
- g. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
- h. Rehabilitasi sedang/berat ruang Laboratorium dan ruang praktikum
- i. Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parker
- j. Rehabilitasi sedang/berat ruang perpustakaan
- k. Pelatihan Penyusunan Kurikulum
- l. Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran
- m. Lomba-Lomba Pendidikan
- n. Bantuan Operasional Pendidikan



- o. Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SMP, SMA, SMK
- p. Pelaksanaan Ujian Akhir SMP, SMA dan SMK
- q. Lomba Usaha Kesehatan Sekolah
- r. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah
- s. Penyelenggaraan Paket C setara SMP

#### **4. Program Pendidikan Non Formal**

- a. Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
- b. Monitoring dan Pelaporan
- c. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
- d. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
- e. Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
- f. Jambore PTK PNF
- g. Hari Anak Nasional (HAN)
- h. Hari Aksara Internasional (HAI)
- i. Gebyar PAUD

#### **5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

- a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
- b. Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Pembinaan Kelompok Kerja Guru
- d. Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
- e. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
- f. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK
- g. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD
- h. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK

#### **6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

- a. Kegiatan ISO/SNI 9001-2008
- b. Kegiatan Pengembangan Kurikulum Pemenuhan SPM
- c. Kegiatan ISO SMP, SMA dan SMK
- d. Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
- e. Kegiatan Pembinaan Gugus



- f. Kegiatan Pakaian UKS Tim Kabupaten

#### **7. Program Wajib Belajar 12 Tahun.**

- a. Peningkatan Sarana prasarana dan kualitas Pendidikan
- b. Lomba-lomba Bidang Pendidikan
- c. Rehabilitasi Gedung Sekolah
- d. Pembangunan Gedung Sekolah
- e. Pengadaan Meubelair
- f. Pemantapan dan Try out ujian akhir SMP, SMA dan SMK
- g. Ujian Akhir SMP, SMA dan SMK

#### **8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, peninggalan bawah air.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Adat.

#### **9. Program Pengembangan Nilai Budaya**

- a. Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat Budaya Daerah.
- b. Kegiatan Kemah Budaya

#### **10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.**

- a. Kegiatan Revitalisasi Kesenian Daerah.
- b. Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
- c. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
- d. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman Budaya.
- e. Kegiatan Pekan Seni Pelajar
- f. Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat melalui lomba ke tingkat Propinsi (lembaga desa pekraman subak-subak)

#### **11. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan.**

- a. Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Nasional
- b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.



**12. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
- b. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR)
- c. Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
- d. Kegiatan Lomba-Lomba Pendidikan

**13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**

- a. Kegiatan Pengadaan Sarana Olahraga.

**14. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.**

- a. Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
- b. Kegiatan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri

**15. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

- a. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- b. Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

**5.2. PAGU INDIKATIF DAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN.**

Jumlah rencana pagu indikatif Program / Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan dari tahun 2011 - 2016 yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jemberana sebagai berikut :

**Bidang Pendidikan :**

- a. Tahun 2011 sebesar Rp. 58.579.987.760,00
- b. Tahun 2012 sebesar Rp. 56.285.259.660,00
- c. Tahun 2013 sebesar Rp. 59.092.121.638,00
- d. Tahun 2014 sebesar Rp. 62.021.772.724,00
- e. Tahun 2015 sebesar Rp. 64.845.496.110,00
- f. Tahun 2016 sebesar Rp. 68.087.811.416,00

**Bidang Pemuda Olahraga**

- a. Tahun 2011 sebesar Rp. 1.269.457.000,00
- b. Tahun 2012 sebesar Rp. 1.750.000.000,00
- c. Tahun 2013 sebesar Rp. 1.837.500.000,00
- d. Tahun 2014 sebesar Rp. 1.929.375.000,00



Dikporaparbud Kab. Jembrana

- e. Tahun 2015 sebesar Rp. 2.025.843.750,00
- f. Tahun 2016 sebesar Rp. 2.127.135.938,00

**Bidang Pariwisata**

- a. Tahun 2011 sebesar Rp. 565.000.000,00
- b. Tahun 2012 sebesar Rp. 550.000.000,00
- c. Tahun 2013 sebesar Rp. 577.500.000,00
- d. Tahun 2014 sebesar Rp. 606.375.000,00
- e. Tahun 2015 sebesar Rp. 636.693.750,00
- f. Tahun 2016 sebesar Rp. 668.528.437,00

**Bidang Kebudayaan**

- g. Tahun 2011 sebesar Rp. 1.821.649.000,00
- h. Tahun 2012 sebesar Rp. 2.289.000.000,00
- i. Tahun 2013 sebesar Rp. 2.403.450.000,00
- j. Tahun 2014 sebesar Rp. 2.523.622.500,00
- k. Tahun 2015 sebesar Rp. 2.644.553.625,00
- l. Tahun 2016 sebesar Rp. 2.776.781.305,00

Lebih lanjut Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam bentuk tabel pada Lampiran 1





## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

#### **9.1 Indikator Kinerja**

##### **9.1.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja**

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi



Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **9.1.2 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya



dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

**IKK Pendidikan Lima Tahun 2011 – 2015**

KEGIATAN	IKK				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>PROGRAM PAUD</b>					
APK TK	55.00%	55.00%	56.00%	57.00%	57.00%
APK PAUD NON FORMAL	12.45%	17.45%	22.45%	27.45%	27.45%
Presentase Jumlah TK Terakreditasi	84.00%	91.00%	98.00%	100.00%	100.00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DASAR</b>					
APK SD	121.33%	127.39%	133.76%	140.45%	140.45%
APK PAKET A	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
% SD Memiliki Perpustakaan	50.00%	65.00%	80.00%	100.00%	100.00%
% SD Memiliki Lab Komputer	47.00%	65.00%	80.00%	100.00%	100.00%
RUANG KELAS RUSAK	10.00%	9.50%	9.00%	4.00%	4.00%
Jumlah SD Menerapkan KTSP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
APK SMP	111.00%	112.00%	115.00%	118.00%	118.00%
APK Paket B	3.32%	3.00%	3.00%	2.00%	2.00%
% SMP Memiliki Perpustakaan	87.88%	90.00%	98.00%	100.00%	100.00%
% SMP Memiliki Lab Komputer	83.00%	90.00%	98.00%	100.00%	100.00%
% SMP Memiliki Lab IPA	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%	100.00%
Jumlah Sekolah Menerapkan KTSP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>					
APK SMA	48.40%	48.50%	48.60%	48.70%	48.70%
APK SMK	33.19%	33.39%	33.59%	33.79%	33.79%
APK PAKET C	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%
% SMA Memiliki Perpustakaan	80.00%	85.00%	90.00%	100.00%	100.00%
% sma Memiliki Lab Komputer	80.00%	90.00%	95.00%	100.00%	100.00%
% SMA Memiliki Lab IPA	80.00%	90.00%	95.00%	100.00%	100.00%
Jumlah Sekolah Menerapkan KTSP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
<b>PROGRAM PMPTK</b>					
Rasio Guru TK terhadap Siswa	30	25	20	15	15
% Guru TK Kualifikasi S1/D4	35.00%	76.00%	97.00%	100.00%	100.00%
% Guru TK Bersertifikasi	46.97%	79.00%	87.00%	100.00%	100.00%
Rasio Guru SD terhadap Siswa	22	25	28	32	32
% Guru SD S1/D4	93.73%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
% Guru SD Berserifikasi	42.00%	60.00%	78.00%	100.00%	100.00%
Rasio Guru SMP terhadap Siswa	18	18	18	17	17
% Guru Berkualifikasi S1/D4	96.00%	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%
% Guru SMP Berserifikasi	70.00%	75.00%	90.00%	100.00%	100.00%



Rasio Guru SMA terhadap Siswa	22	22	20	20	20
% Guru SMA S1/D4	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Guru SMA Berserifikasi	63.00%	89.00%	95.00%	100.00%	100.00%
Rasio Guru SMK terhadap Siswa	14	14	14	14	14
% Guru SMK S1/D4	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Guru SMk Berserifikasi	60.00%	75.00%	88.00%	100.00%	100.00%
<b>SEKOLAH MENENGAH/PAKET C</b>					
APK SMA	48.40%	48.50%	48.60%	48.70%	48.70%
APK SMK	33.19%	33.39%	33.59%	33.79%	33.79%
APK PAKET C	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%
% SMA Memiliki Perpustakaan	80.00%	85.00%	90.00%	100.00%	100.00%
% sma Memiliki Lab Komputer	80.00%	90.00%	95.00%	100.00%	100.00%
% SMA Memiliki Lab IPA	80.00%	90.00%	95.00%	100.00%	100.00%
Jumlah Sekolah Menerapkan KTSP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
<b>PROGRAM PMPTK</b>					
Rasio Guru TK terhadap Siswa	30	25	20	15	15
% Guru TK Kualifikasi S1/D4	35.00%	76.00%	97.00%	100.00%	100.00%
% Guru TK Bersertifikasi	46.97%	79.00%	87.00%	100.00%	100.00%
Rasio Guru SD terhadap Siswa	22	25	28	32	32
% Guru SD S1/D4	93.73%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
% Guru SD Berserifikasi	42.00%	60.00%	78.00%	100.00%	100.00%
Rasio Guru SMP terhadap Siswa	18	18	18	17	17
% Guru Berkualifikasi S1/D4	96.00%	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%
% Guru SMP Berserifikasi	70.00%	75.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Rasio Guru SMA terhadap Siswa	22	22	20	20	20
% Guru SMA S1/D4	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Guru SMA Berserifikasi	63.00%	89.00%	95.00%	100.00%	100.00%
Rasio Guru SMK terhadap Siswa	14	14	14	14	14
% Guru SMK S1/D4	99.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Guru SMk Berserifikasi	60.00%	75.00%	88.00%	100.00%	100.00%



No.	KEGIATAN	IKK				
		2010	2011	2012	2013	2015
	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA					
1	APK SMP	111.00%	112.00%	115.00%	118.00%	118.00%
2	APK Paket B	3.32%	3.00%	3.00%	2.00%	2.00%
3	% SMP Memiliki Perpustakaan	87.88%	90.00%	98.00%	100.00%	100.00%
4	% SMP Memiliki Lab Komputer	83.00%	90.00%	98.00%	100.00%	100.00%
5	% SMP Memiliki Lab IPA	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%	100.00%
6	Jumlah Sekolah Menerapkan KTSP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



## **BAB VII P E N U T U P**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Jembrana tahun 2011 - 2016 ini mengacu pada visi dan misi Bupati Jembrana. RENSTRA ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana menghadapi tantangan pembangunan Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jembrana ini yang semakin kompleks.

RENSTRA ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam 5 tahun ke depan. Semoga upaya Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam 5 tahun dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RENSTRA ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dalam meningkatkan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan di kabupaten tercinta ini.

Negara, 11 juni 2011  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga  
Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Jembrana,



**Nengah Alit, M.Pd**  
Pembina Tk. I  
NIP: 19641215 198803 1 007



Dikporaparbud Kab. Jembrana



LAMPIRAN I :

BERITA ACARA KESEPAKATAN  
HASIL FORUM SKPD  
NOMOR  
TANGGAL

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DIKPORAPARBUD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2012			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagi indikatif	Sumber Dana
1 01 01 1	<b>I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>1.888.032.225,00</b>	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administarsi Perkantoran	Kabupaten Jembrana	3.080 lbr	15.510.000,00	APBD
	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kabupaten Jembrana	30 unit kendaraan dan 64 peralatan	130.000.000,00	APBD
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kabupaten Jembrana	12 bulan	120.000.000,00	APBD
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kabupaten Jembrana	1 paket	75.000.000,00	APBD
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kabupaten Jembrana	2 jenis	132.522.225,00	APBD
	6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kabupaten Jembrana	60 bh dan 1 set	40.000.000,00	APBD
	7 Penyediaan makanan dan Minuman		Kabupaten Jembrana	24.989 kotak	75.000.000,00	APBD
	8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah		Kabupaten Jembrana	kali	300.000.000,00	APBD
	9 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi		Kabupaten Jembrana	103 orang	1.000.000.000,00	APBD
	<b>II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>420.000.000,00</b>	
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala	Terpeliharanya Kendaraan	Kabupaten	32 unit	330.000.000,00	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2012			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagi indikatif	Sumber Dana
	Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas	Jembrana			
	2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional	Kabupaten Jembrana	6 buah	90.000.000,00	APBD
1 01 01 15	<b>III PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>				<b>5.000.000,00</b>	
1 01 01 15 65	1 Publikasi dan sosialisasi PAUD	Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi PAUD	Kabupaten Jembrana	49 Lembaga	5.000.000,00	APBD
1 01 01 16	<b>IV PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN</b>				<b>42.161.457.250</b>	
1 01 01 63 63	1 Penyediaan Operasional Sekolah	Meningkatnya Program Wajib Belajar 9 Tahun	Kab. Jembrana	210 sekolah	16.882.776.000	APBD
1 01 01 16 86	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan Kualitas Pendidikan SD (DAK)	Meningkatnya Program Wajib Belajar 9 Tahun	Kabupaten Jembrana	40 sekolah	19.000.000.000	APBN
1 01 01 16 86	3 Pendampingan DAK	Meningkatnya Program Wajib Belajar 9 Tahun	Kab. Jembrana	40 Sekolah	1.900.000.000	APBD
1 01 01 16 51	4 Rehabilitas Ruang Kelas/ Pagar Alas	Meningkatnya Program Wajib Belajar 9 Tahun	Kab. Jembrana	1 Paket	2.750.000.000	APBD
1 01 01 16 63	5 Pendampingan BOS Kabupaten	Meningkatnya Program Wajib Belajar 9 Tahun	Kab. Jembrana	210 Sekolah	697.900.000	APBD
1 01 01 20 01	6 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Guru SD/TK	Kab. Jembrana	425 orang	4.781.250	APBD
1 01 01 16 46	7 Rehabilitasi sedang/berat Lab. Dan Praktikum sekolah	Jumlah lab. Yang direhab	Kab. Jembrana	1 paket	100.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2012			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagi indikatif	Sumber Dana
1 01 01 16 45	8 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru	Jumlah ruang guru yang direhab	Kab. Jembrana	1 paket	70.000.000	APBD
1 01 01 16 44	9 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah ruang kelas yang direhab	Kab. Jembrana	1 paket	150.000.000	APBD
1 01 01 16 03	10 Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Kab. Jembrana	1 paket	150.000.000	APBD
1 01 01 16 20	11 Pengadaan Perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan sekolah yang dibeli	Kab. Jembrana	1 paket	456.000.000	APBD
1 01 01 20	<b>V PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>				<b>1.316.505.000</b>	
1 01 01 20 17	1 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK	Terlaksananya Penilaian Kepala TK Negeri/ Swasta	Kab. Jembrana	73 Kepala/TK	3.965.000	APBD
1 01 01 20 15	2 Penilaian Kinerja Kepala SD	Terlaksananya Penilaian Kepala SD	Kab. Jembrana	184 orang	46.000.000	APBD
1 01 01 20 02	3 Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Kompetensi Pendidik dan Tenaga	Kab. Jembrana	969 orang	54.000.000	APBD
1 01 01 16 82	4 Penyelenggaraan Operasional TK	Terpenuhinya Operasional TK	Kab. Jembrana	114 TK	485.640.000	APBD
1 01 01 16 67	5 Penyelenggaraan Paket A setara SD	terdidiknya warga belajar	Kab. Jembrana	100 warga belajar	92.000.000	APBD
1 01 01 16 81	6 Lomba Lomba Pendidikan	Terlaksananya Lomba-Lomba Pendidikan	Kab. Jembrana	80 orang	216.900.000	APBD
	7 Pembinaan UKS	Terlaksananya Pembinaan UKS TK, SD, SMP, SMA	Kab. Jembrana	5 Kecamatan	25.000.000	APBD
1 01 01 16 80	8 Pembinaan Olimpiade Mapel	Terlaksananya Olimpiade Mapel Mat dan IPA	SD N 1 Dangintukadaya	120 orang	50.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2012			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagi indikatif	Sumber Dana
	9 Pembinaan Gugus	Terlaksananya Pembinaan Gugus	Masing2 Kecamatan	5 Kecamatan	20.000.000	APBD
	10 Pembinaan UKS	Terlaksananya Pembinaan UKS	Masing2 Kecamatan	5 Kecamatan	20.000.000	APBD
	11 Pakaian UKS Tim Kabupaten	Terlaksananya Penilaian UKS	Kab. Jembrana	20 orang	3.000.000	APBD
1 01 01 17 11	12 ISO SMP, SMA dan SMK	Jumlah Sekolah yang Di ISO kan	Kab. Jembrana	10 Sekolah	300.000.000	APBD
1 01 01 17	<b>VI PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>				<b>11.843.126.160</b>	
1 01 01 17 01	1 Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung yang dibangun	Kab. Jembrana	3 sekolah	2.000.000.000	APBD
1 01 01 17 03	2 Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Kab. Jembrana	3 sekolah	650.000.000	APBD
1 01 01 17 19	3 Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah Meubelair yang dibeli	Kab. Jembrana	6 sekolah	300.000.000	APBD
1 01 01 17 20	4 Kegiatan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Komputer, LCD	Kab. Jembrana	9 sekolah	544.000.000	APBD
1 01 01 17 44	5 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab	Kab. Jembrana	2 sekolah	150.000.000	APBD
1 01 01 17 45	6 Rehab sedang/berat ruang guru sekolah	jumlah ruang guru yang direhab	Kab. Jembrana	2 sekolah	130.000.000	APBD
1 01 01 17 46	7 Rehabilitasi sedang/berat ruang Lab. Dan ruang praktekum sekolah	Jumlah ruang lab dan praktikum yang direhab	Kab. Jembrana	5 sekolah	150.000.000	APBD
1 01 01 17 50	8 Rehabilitasi sedang/berat taman,	Jumlah rehab pagar alas		2 sekolah	100.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2012			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagi indikatif	Sumber Dana
	lapangan upacara dan fasilitas parkir	sekolah	Kab. Jembrana			
1 01 01 17 53	9 Rehabilitasi sedang/berat ruang perpustakaan sekolah	jumlah ruang perpustakaan yang direhab	Kab. Jembrana	3 sekolah	100.000.000	APBD
1 01 01 17 58	10 Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Meningkatnya Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Kab. Jembrana	56 Guru	60.000.000	APBD
1 01 01 17 70	11 Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran	Meningkatnya Kualitas siswa	Kab. Jembrana	24 Mata Pelajaran	240.000.000	APBD
1 01 01 17 71	12 Lomba-lomba Pendidikan	Meningkatnya peserta lomba	Kab. Jembrana	400 orang	295.000.000	APBD
1 01 01 17 73	13 Bantuan Operasional Pendidikan	Meningkatnya Jumlah Dana Operasional Pendidikan	Kab. Jembrana	9 sekolah	6.429.236.160	APBD
1 01 01 17 76	14 Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SMP, SMA, SMK	Meningkatnya kualitas peserta ujian	Kab. Jembrana	7.350 siswa	100.000.000	APBD
1 01 01 17 77	15 Pelaksanaan Ujian Akhir SMP, SMA dan SMK	Meningkatnya kualitas peserta ujian	Kab. Jembrana	7.350 siswa	26.640.000	APBD
1 01 01 17 78	16 Lomba Wawasan Wiyata Mandala SMP, SMA dan SMK	Meningkatnya jumlah peserta wwm SMP, SMA dan SMK	Kab. Jembrana	3 sekolah	150.000.000	APBD
1 01 01 17 79	17 Lomba Usaha Kesehatan Sekolah	Meningkatnya Peserta Lomba UKS	Kab. Jembrana	3 sekolah	150.000.000	APBD
1 01 01 17 30	18 Pemeliharaan rutin/berkala taman lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya pemeliharaan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP, SMA	Kab. Jembrana	27 sekolah	20.250.000	APBD
1 01 01 17 68	19 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah	Terlaksananya Akreditasi Sekolah Menengah	Kab. Jembrana	47 sekolah	3.000.000	APBD
1 01 01 17 63	20 Penyelenggaraan Paket C setara SMP	terdidiknya warga belajar	Kab. Jembrana	150 warga	245.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2012			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagi indikatif	Sumber Dana
	<b>VII PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>				<b>388.277.500,00</b>	
1 01 01 18 02	1 Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Terbinanya Pendidik Paud Non Formal	Kab.Jembrana	49 Lembaga	24.500.000	APBD
1 01 01 18 13	2 Monitoring dan Pelaporan	Terbinanya satuan pendidikan Non Formal	Kab.Jembrana	1 paket	25.000.000	APBD
1 01 01 18 04	3 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Tuntasnya Pendidikan Keaksaraan	Kab.Jembrana	200 orang	72.000.000	APBD
1 01 01 18 05	4 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	Trampilnya warga masyarakat	Kab.Jembrana	100 orang	150.000.000	APBD
1 01 01 18 06	5 Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal	Tersedianya Outdoor dan APE	Kab.Jembrana	Outdoor 3 lembaga dan APE 16 Lembaga	77.500.000	APBD
1 02 01 18 32	6 Jambore PTK PNF	Terbinanya PTK PNF	Prov.Bali	17 orang	8.480.000	APBD
1 02 01 18 33	7 Hari Anak Nasional (HAN)	Terbinanya Anak Didik PAUD Non Formal	Prop Bali	60 anak didik	7.862.500	APBD
1 02 01 18 34	8 Hari Aksara Internasional (HAI)	Terbinanya Peserta didik	Prov.Bali	11 warga belajar	5.072.500	APBD
1 02 01 18 35	9 Gebyar PAUD	Terbinanya anak didik PAUD Non Formal Prop bali	Prop Bali	40 anak didik	17.862.500	APBD
<b>1 01 01 20</b>	<b>VIII PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>				<b>114.000.000,00</b>	
1 01 01 20 04	1 Pembinaan Kelompok Kerja Guru	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kerja Guru (MGMP)	Kabupaten Jembrana	32 MGMP	90.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2012			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagi indikatif	Sumber Dana
1 01 01 20 01	2 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah guru yang tersertifikasi	Kabupaten Jembrana	150 Guru	3.000.000	APBD
1 01 01 20 09	3 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Sistem Pendataan di SMA dan SMK Negeri	Kabupaten Jembrana	9 Sekolah	9.000.000	APBD
1 01 01 20 15	4 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah pada tingkat SMP, SMA dan SMK Negeri	Kabupaten Jembrana	56 Kepala Sekolah	12.000.000	APBD
1 01 01 15	<b>X PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>				<b>154.000.000,00</b>	
1 01 01 15 01	1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya UDG Kab. Dan Provinsi	Kabupaten & Provinsi	1.360 orang	119.000.000	APBD
1 01 01 15 07	2 Kemah Budaya	Terbinanya Budaya dikalangan siswa	Kab. Dan Provinsi	150 orang	35.000.000	APBD
1 01 01 16	<b>XI PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>				<b>255.000.000,00</b>	
1 0 0 1 16 05	1 Pengeloaan dan Pengembangan Pelestarian Penggalan sejarah purbakala,museum, peninggalan bawah air	Terpeliharanya sejarah museum Purbakala	Gilimanuk	1 unit	100.000.000	APBD
1 0 0 1 16 14	2 Pemberdayaan Lembaga Adat	Meningkatkan kinerja lembaga adat melalui lomba dan monev lembaga adat	Kabupaten Jembrana	25 Lembaga	155.000.000	APBD
1 0 0 1 17	<b>XII PROGRAM PENGELOLAAN</b>					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2012			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagi indikatif	Sumber Dana
					<b>KEKAYAAN BUDAYA</b>				<b>1.920.000.000,00</b>	
1	0	0	17	08	1 Revitalisasi Kesenian Daerah	Jumlah Kesenian yang dilindungi	Kab. Jembrana	2 sekaa	80.000.000	APBD
1	0	0	17	04	2 Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keaneka ragaman Budaya	meningkatnya keanekaragaman seni budaya	Kab. Jembrana	20 sekaa	40.000.000	APBD
1	0	0	17	05	3 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terbinanya Sekaa Kesenian melalui HUT Kota Negara	Kab jembrana	25 Sekaa	900.000.000	APBD
						Terbinanya Seka kesenian melalui Kegiatan PKB	Provinsi Bali	15 sekaa	800.000.000	APBD
1	0	0	17	08	4 Pekan Seni Pelajar	Terbinanya Seni Siswa melalui Pekan Seni Pelajar	Provinsi Bali	50 orang	100.000.000	APBD
					<b>XIII PROGRAM PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>				<b>252.350.000,00</b>	
					1 Napak Tilas Jejak Pahlawan	Terlaksananya Napak Tilas Jejak Pahlawan	Kab. Jembrana	250 orang	150.000.000	APBD
					2 Fasilitasi Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Terbinanya Generasi Muda	Kab. Jembrana	397 orang	102.350.000	APBD
					<b>XIV PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA</b>				<b>1.497.650.000,00</b>	
					1 Pengadaan Sarana Olahraga	Tersedianya sarana olahraga	Kab. Jembrana	3 cabor	100.000.000	APBD
					2 Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR)	Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar	Kabupaten/prop /Nasional	5.000 orang	964.432.200	APBD
					3 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Terlaksananya Olimpiade Siswa Nasional	Kabupaten/prop /Nasional	200 orang	304.413.000	APBD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahunan 2012			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagi indikatif	Sumber Dana
	3 Lomba-lomba Olahraga	Terlaksananya Lomba-lomba Olahraga	Kabupaten/prop /Nasional	4.170 orang	128.804.800	APBD
1 01 01 15	<b>XV PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>				<b>250.000.000,00</b>	
1 01 01 15 03	1 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Terlaksananya Kerjasama Promosi Pariwisata	Kab. Jembrana	1 paket	100.000.000	APBD
1 01 01 15 05	2 Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri	Terbinanya Generasi Muda	Luar Daerah	2 kegiatan	150.000.000	APBD
1 01 01 16	<b>VVI PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>				<b>300.000.000,00</b>	
1 01 01 16 02	1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Penataan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana	Kab. Jembrana	2 obyek	100.000.000	APBD
1 01 01 16 03	2 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Pelaksanaan lomba mekepong	Kab. Jembrana	2 kali lomba	200.000.000	APBD
<b>JUMLAH USULAN ANGGARAN TAHUN 2012</b>					<b>62.765.398.135,00</b>	